

# DINAMIKA NAHDLATUL WATHAN LOMBOK TIMUR DALAM PEMILU PASCA ERA ORDE BARU SAMPAI PEMILU 2014

**Fandy Abdurrahman**

*Anggota Organisasi Nahdlatul Wathan Lombok Timur*

*Email: fandy\_rahman@yahoo.com*

**Abstrak:** *Tulisan ini membahas tentang dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur dalam pemilu pasca orde baru sampai pemilu 2014. Nahdlatul Wathan terbagi dalam Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani. Keduanya menggunakan memilih berafiliasi dengan partai politik apapun pada setiap pemilu. Karena dalam menentukan pilihannya, Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani menimbang-nimbang partai politik mana yang lebih memberi manfaat dan membawa kerugian yang minim karena partai politik yang dipilih oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani akan menentukan perkembangan Nahdlatul Wathan ke depan. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam penyebaran ajarannya sebagai tujuan dari berafiliasi dengan partai politik dan jabatan di pemerintahan eksekutif dan legislatif, tetap menjunjung tinggi nilai syari'at Islam yaitu menggunakan asas keadilan, persamaan, toleransi, solidaritas dan kemerdekaan sesuai dengan konsep mabadi' syari'ah.*

**Kata Kunci:** Nahdlatul Wathan, Pasca Era Orde Baru

## **A. Pendahuluan**

Nahdlatul Wathan merupakan sebuah organisasi sosial keagamaan masyarakat dengan fokus kegiatan pada bidang pendidikan, sosial dan da'wah keagamaan. Organisasi ini merupakan organisasi tertua dan terbesar di Nusa Tenggara Barat. Organisasi Nahdlatul Wathan didirikan oleh seorang ulama besar yaitu Maulana Syaikh TGKH<sup>1</sup>. M. Zainuddin

---

<sup>1</sup>TGKH adalah singkatan dari "Tuan Guru Kiyai Haji", julukan yang diberikan bagi seorang kiyai yang karismatik yang memiliki peran sangat penting dalam perjuangan Islam bagi seorang yang pernah meunaikan ibadah haji, memiliki ilmu agama yang sangat tinggi dan tergolong sudah sesepuh dikalangan masyarakat.

Abdul Majid. Nahdlatul Wathan kemudian dideklarasikan pada hari minggu 15 Jumadil Akhir 1372 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 di Pancor Lombok Timur NTB.<sup>2</sup>

Sebagai organisasi keagamaan masyarakat, Nahdlatul Wathan telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kontribusi yang telah dilakukan tidak hanya melalui pendidikan dan da'wah, akan tetapi juga telah mencetak banyak kader-kader aktifis pejuang yang ikut berkiprah di dunia perpolitikan. Hal ini guna menciptakan relasi dengan beberapa partai politik, mulai dari partai Masyumi kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) di masa Orde Baru.<sup>3</sup>

Gejolak politik yang terjadi di Negara ini berpengaruh pada tubuh organisasi Nahdlatul Wathan mulai sejak tahun 1976. Dalam menghadapi pemilu legislatif banyak tantangan yang terjadi, dari peristiwa pengunduran diri beberapa pimpinan Nahdlatul Wathan baik di tingkat Pengurus Besar (PB), wilayah dan pengurus daerah, bahkan terjadi konflik interen keluarga besar TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid. Namun konflik di tubuh organisasi Nahdlatul Wathan masih dapat diatasi oleh TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid dengan mengadakan muktamar kilat tanggal 31 Januari 1977 untuk menggantikan aparat provokator dan pembangkan yang ada di tubuh organisasi NW.

Pasca meninggalnya TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid malam rabu 21 Oktober 1997, terjadi perpecahan dan konflik di kalangan keluarga, masyarakat dan para Tuan Guru. Mereka menginginkan pemilihan PBNW yang baru. Di organisasi mulai terjadi perpecahan dan perebutan kekuasaan, di antara keluarga (kedua anak TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid yaitu Hj. Siti Rahun dan Hj. Siti Raihanin) yang masing-masing menganggap mempunyai hak untuk menggantikan posisi sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Watha (PBNW). Di jajaran kepengurusan organisasi pun telah lahir tiga kubu dalam perebutan kekuasaan. Pertama, kubu yang loyal pada H. M. Syubli dan Hj. Siti Rahun. Kedua, kubu yang loyal pada L. Gde Wiresentane dan Hj. Siti Raihaun. Sedangkan kubu ketiga adalah kubu yang netral.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Abdul Hayyi Nu'man, *Riwayat Hidup dan Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid*, (Pancor: PBNW, 1999), hlm. 139.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

<sup>4</sup>Tim Redaksi Kabid Pendidikan Nahdlatul Wathan, *Ke-NW-an Untuk Kalangan Sendiri*, (Pancor: Biro Dakwah yayasan pendidikan HAMZANWADI, 2001), hlm. 5.

Potensi besar yang dimainkan oleh Nahdlatul Wathan sebagai kelompok mayoritas tidak akan pernah sempurna jika konflik masih berlanjut. Upaya-upaya islah atau rekonsiliasi selama ini selalu gagal di tengah jalan. Kedua kubu belum menemukan kata sepakat dalam proses rekonsiliasi karena kurangnya dialog dan kuatnya kepentingan kelompok ketiga yang sengaja menginginkan konflik tetap dipertahankan. Faktor wasiat pendiri Nahdlatul Wathan yang meramalkan durasi konflik selama seperlima abad atau 20 tahun dijadikan dalih untuk menunda kesepakatan 'islah' karena khawatir jika wasiat tersebut tidak benar.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, kemudian timbul persaingan politik diantara para kader Nahdlatul Wathan untuk merebut simpati warga Nahdlatul Wathan dan integritas di mata pemerintah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan cara membangun relasi politik dengan partai politik, baik para kader Nahdlatul Wathan Anjani maupun para kader Nahdlatul Wathan Pancor masing-masing membidik satu partai politik untuk membangun relasi politiknya. Relasi yang dibangun bertujuan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai, baik kepentingan Nahdlatul Wathan dan juga kepentingan relasi politiknya sehingga ada hubungan timbal-balik antar kedua mitra tersebut.

Dinamika mitra partai politik yang terjadi di tubuh organisasi Nahdlatul Wathan berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan politik nasional. Persaingan antara Nahdlatul Wathan Pancor dengan Nahdlatul Wathan Anjani yang semakin sengit dalam ranah politik menggugah setiap kubu untuk memperkuat relasi politiknya. Tercapainya kepentingan-kepentingan politik kubu Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani sangat tergantung dengan seberapa kuat relasi politik yang mereka bangun. Hal ini lah yang menjadi daya tarik bagi partai-partai politik nasional untuk menawarkan kerjasama kepada Nahdlatul Wathan karena Nahdlatul Wathan merupakan organisasi kemasyarakatan yang sangat berpengaruh di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok.

Beberapa partai pernah berafiliasi dengan Nahdlatul Wathan setelah reformasi Indonesia atau setelah meninggalnya Tuan Guru Zainuddin. Pada Pemilu 1999, kubu Anjani tetap berafiliasi ke Partai Golkar, sedangkan Kubu Pancor berafiliasi ke Partai Daulat Rakyat (PDR)

---

<sup>5</sup>Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan Di Era Reformasi: Agama, Konflik dan Peta Rekonsiliasi*, (Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014), hlm. Ix.

Pimpinan Adi Sasono. Sedangkan pada Pemilu 2004, Kubu Pancor berafiliasi ke Partai Bulan Bintang (PBB), sedangkan Kubu Anjani berafiliasi ke Partai Bintang Reformasi (PBR). Kedua partai politik afiliasi Nahdlatul Wathan ini selalu memperoleh suara yang signifikan di NTB. Kedua kubu bersaing dalam mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Setelah kedua partai mereka gagal meraih suara 2.5% pada Pemilu 2008, kedua kubu mengubah kembali haluan politiknya pada Pemilu 2014, di mana Nahdlatul Wathan Pancor beralih ke Partai Demokrat, sedangkan Nahdlatul Wathan Anjani ke PKB dan Hanura.<sup>6</sup>

Keentingan-keentingan politik yang ingin Nahdlatul Wathan capai dapat mengakibatkan biasanya ideologi-ideologi yang selama ini mereka junjung dalam organisasi Nahdlatul Wathan. Namun demikian, sebagai organisasi Islam Nahdlatul Wathan tentunya harus merujuk pada syari'at Islam. Syari'at-syari'at Islam harus tetap menjadi landasan dalam membentuk hubungan relasi politik dengan partai politik baik partai politik Islam maupun partai politik sekuler. Pertanyaan yang kemudian muncul ialah apakah dalam membangun relasi politik, Nahdlatul Wathan masih mengedepankan syari'at-syari'at Islam atau hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan politik yang ingin dicapai. Mengingat Nahdlatul Wathan merupakan organisasi keagamaan masyarakat yang berlandaskan syari'at-syari'at Islam. Kemudian apakah permasalahan kepentingan Nahdlatul Wathan dan gejala politik nasional mengakibatkan Nahdlatul Wathan berganti-ganti mitra politik pada setiap pemilu. Beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas, membuat penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih jauh guna mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.

Tulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan dinamika politik Nahdlatul Wathan dalam berafiliasi dengan partai-partai politik nasional pasca Orde Baru sampai Pemilu 2014. Dan korelasi Siyasah terhadap relasi yang dibangun oleh Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional. Sehingga ketika melihat fenomena dinamika mitra politik antara Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional di Lombok Timur, perlu menggunakan teori yang sesuai untuk melihat pandangan dari siyasah terhadap masalah itu. Diantara teori yang bisa dilihat untuk mengukur mafaat dari relasi yang di bangun antara Nahdlatul Wathan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 48.

dengan partai-partai politik nasional adalah teori *maqashid syari'ah* dan *rational choice theory* (teori pilihan rasional).

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Maqashid syari'ah* secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.<sup>7</sup> Menurut al-Syatibi kandungan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Jadi substansi dari *maqashid syari'ah* adalah kemaslahatan.<sup>8</sup> *Maqashid syari'ah* dalam arti *Maqashid al-Syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan.
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti. Aspek pertama juga berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>9</sup> Sedangkan *Rational choice theory* melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, sejauh mana program-program yang disodorkan oleh kandidat tersebut akan menguntungkan dirinya atau sebaliknya malah merugikan. Menurut hal tersebut, yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya “ongkos” memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi dipergunakan untuk membangun sebuah keputusan tentang partai

---

<sup>7</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 64.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 71.

politik atau seorang kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak memilih.<sup>10</sup> Dalam konteks teori semacam ini, sikap dan pilihan politik tokoh-tokoh populer tidak selalu diikuti oleh para pengikutnya kalau ternyata secara rasional tidak menguntungkan.

Pilihan politik yang pemilih ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum. Sehingga pada kenyataannya, terdapat sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yaitu faktor situasional yang juga turut mempengaruhi pemilih ketika menentukan pilihan politiknya pada pemilu. Hal ini disebabkan seorang pemilih tidak hanya pasif, terbelenggu oleh karakteristik sosiologis dan faktor psikologis akan tetapi merupakan individu yang aktif dan bebas bertindak. Menurut *rational choice theory*, faktor-faktor situasional berupa isu-isu politik dan kandidat yang dicalonkan memiliki peranan yang penting dalam menentukan dan merubah referensi pilihan politik seorang pemilih karena melalui penilaian terhadap isu-isu politik dan kandidat dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, seorang pemilih akan dibimbing untuk menentukan pilihan politiknya.<sup>11</sup>

Esensi dari *rational choice* adalah ketika dihadapkan pada beberapa alur tindakan, manusia biasanya memilih alur yang mereka yakini akan mendatangkan manfaat yang paling besar bagi manusia tersebut. Hal tersebut dijabarkan secara lebih detil dalam pernyataan-pernyataan dasar *rational choice theory*, sebagai berikut:

1. Manusia memiliki seperangkat preferensi-preferensi yang bisa mereka pahami, tata menurut skala prioritas, dan dibandingkan antara satu dengan yang lain.

---

<sup>10</sup> P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 91.

<sup>11</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992), hlm. 146.

2. Tatanan preferensi ini bersifat transitif, atau konsisten dalam logika. Misalnya, jika seseorang lebih memilih sosialisme dibanding liberalisme, dan liberalisme dibanding fasisme, maka orang tersebut pasti lebih memilih sosialisme dibanding fasisme.
3. Tataaan preferensi itu didasarkan pada prinsip memaksimalkan manfaat dan meminimalka resiko.
4. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois.

Pernyataan-pernyataan ini menjadi basis bagi pengembangan preposisi-preposisi teoritik *rational choice*.<sup>12</sup> Dalam menganalisis permasalahan ini penulis juga ditunjang dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Pada sejarahnya, Rasul pernah melakukan koalisi atau pada masa itu disebut *at-Tabaluf* (kompromi). *At-Tabaluf* berasal dari kata *al-Hilfu* yang artinya perjanjian untuk saling menolong yang berasal dari kata *halafa yahlifu hilfan*. Dalam bentuk kalimat dikatakan *hilfuhu fulan fayakunu halifu* (Fulan berjanji dengan Fulan maka ia menjadi sahabatnya).<sup>13</sup> Rasul pernah melakukan koalisi baik dengan kaum muslim maupun kaum non muslim saat waktu itu Islam masih lemah. Jadi koalisi menurut Islam diperbolehkan jika keadaan masih lemah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Dalam proses penulisan tulisan ini, penulis melakukan penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data-data yang akan dikumpulka berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung lapangan. Serta, data juga akan dikumpulkan dari beberapa tulisan entah itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel dll. Tentunya yang sekiranya relevan dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu mengenai pandangan siyasah terhadap hubungan mitra politik antara Nahdlatul Wathan dengan partai-partai politik nasional. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam tulisan ini ialah pendekatan *historys-sosiologis politik*. Dimana, Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perjalanan sejarah mitra politik Nahdlatul

---

<sup>12</sup>Joash Tapiheru, "Rational Choice Theory", [http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffelisa1.ugm.ac.id%2Ffiles%2FPSantos\\_o\\_Isipol%2F1VqiBwkh%2FRATIONAL%2520CHOICE%2520THEORY.pdf&ei=SfDmVO64C8i6uASnoH4BA&usg=AFQjCNF1nOg19XEO4P-KBPUejFyhOAS9qA&bvm=bv.86475890,d.c2E](http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Ffelisa1.ugm.ac.id%2Ffiles%2FPSantos_o_Isipol%2F1VqiBwkh%2FRATIONAL%2520CHOICE%2520THEORY.pdf&ei=SfDmVO64C8i6uASnoH4BA&usg=AFQjCNF1nOg19XEO4P-KBPUejFyhOAS9qA&bvm=bv.86475890,d.c2E). Akses 21 Februari 2015.

<sup>13</sup>Munir Muhammad al-Gadban, *Al-Tahalluf al-Siyasi Fi al-Islam*, ( t.t.: Al-Manar, t.t.), hlm. 6.

Wathan. Penulis akan melihat sejarah mitra politik Nahdlatul Wathan dari Era Orde Baru sampai Pemilu 2014.

## **B. Dinamika Politik Nahdlatul Wathan dalam Berafiliasi Pasca Era Orde Baru Sampai Pemilu 2014**

### **1. Pijakan Nahdlatul Wathan dalam Berpolitik**

Pasca meninggalnya TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dan pasca terjadinya konflik di dalam tubuh kepengurusan Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Wathan memiliki dua kepengurusan yaitu Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani. Kedua kubu tersebut selalu bersaing dalam bidang-bidang yang mereka terapkan dalam gerakan-gerakan mereka. Dan dalam melaksanakan gerakan atau kegiatan organisasi pada setiap bidang, baik Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani tetap berpedoman pada ajaran *Ablussunnah wal Jama'ah 'ala Mazhabil Imamisy Syafi'i r.a radliyallahu 'anhu* yang merupakan asas yang diterapkan sejak Nahdlatul Wathan didirikan. *Ablussunnah wal Jama'ah* juga menjadi landasan Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam berpolitik.

*Ablussunnah wal Jama'ah* mempunyai dimensi pokok yang menjadi landasan keberagamaan, yaitu masalah *ushuluddin* (pokok-pokok agama), *syari'ah*, dan *akhlaq*. Ketiga landasan pokok ini berdasarkan Al-Qur'an, hadits, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dalam penerapan empat sumber hukum di atas, jumhur ulama telah menetapkan urutan penerapan sebagai sumber hukum yaitu, Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, lalu hadits atau sunnah sebagai rujukan kedua, dan menjadikan ijtihad melalui *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai rujukan setelah ketiga dan keempat.<sup>14</sup>

Empat rujukan atau sumber hukum *Ablussunnah wal Jama'ah* yang juga dipergunakan oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani sebagai rujukan atau sumber hukum adalah Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas* dan berikut penjelasannya:

#### **1) Al-Qur'an**

Kandungan Al-Qur'an yang berisikan tentang penjelasan terhadap *aqidah* atau *tauhid* manusia, bertujuan agar menjadikan

---

<sup>14</sup>Muslihan Habib, *Pendidikan Ke-NW-an Untuk Kelas XI*, (Pancor: Bania Publishing, 2013), hlm. 1.

manusia tidak melenceng dari kehendak Allah SWT. Terkait *aqidah* (keyakinan), di dalam Al-Qur'an telah digariskan bahwa *aqidah* yang benar adalah percaya terhadap Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kemudia serta percaya terhadap *Qadha* dan *Qadar* Allah SWT. Khusus untuk *tauhid* yang berarti mengesakan Allah SWT, adalah salah satu misi para nabi dan rasul sebelumnya untuk disampaikan kepada umatnya. Pentingnya pemahaman dan aplikasi *tauhid* ini, maka dalam Al-Qur'an kata *tauhid* dan yang seakar dengannya terulang 31 kali pengulangan. Al-Qur'an memiliki kandungan terkait dengan jalan atau cara memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menjelaskan dan mengarahkan kepada manusia mengenai peraturan-peraturan pergaulan hidup, baik secara individu ataupun kolektif (bermasyarakat).

Bagi kaum *Ahlussunnah wal Jama'ah*, eksistensi Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam segala hal yang meliputi: *Aqidah*, *syari'ah* dan *akhlaq*. Mereka meyakini bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang merupakan sebaik-baik perkataan. Mereka menetapkan firman Allah SWT di atas segala perkataan manusia dari golongan manapun. Betapa tingginya kedudukan Al-Quran sebagai dasar hukum yang penuh berkah dan rahmat dari Allah SWT. Karena itulah sebagai syarat untuk bertaqwa kepada Allah SWT.<sup>15</sup> Manusia diwajibkan mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah SWT.

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقوا لعلمكم ترحمون<sup>16</sup>

## 2) Al-Sunnah (Hadits)

Kedudukan Hadits/Sunnah sebagai sumber hukum Islam ialah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Yaitu dimana suatu masalah yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an, maka kita pergunakan Hadits/Sunnah sebagai dasar hukumnya. Mengenai Hadits/Sunnah sebagai sumber hukum kedua ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

ياايهاالذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>16</sup> QS. Al-An'am (6): 155.

<sup>17</sup> QS. An-Nisa (4): 59.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa kedudukan Hadits/Sunnah Nabi SAW itu adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran.<sup>18</sup>

وما تاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا<sup>19</sup>

### 3) *Ijma'*

*Ijma'* dapat berkedudukan sebagai dasar hukum (*hujjah*) selama dalam suatu masalah tidak didapati nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jadi kedudukan *Ijma'* sebagai dasar hukum adalah menduduki tempat ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits/Sunnah. *Ijma'* dipandang sah, apabila mempunyai sandaran yang kuat, sebab *Ijma'* bukan dalil yang berdiri sendiri. Adapun sandaran *Ijma'* ada kalanya berupa dalil *Qath'i* (Al-Qur'an dan Hadits mutawatir) dan ada kalanya berupa dalil *zhanni* (Hadits Ahad dan *Qiyas*).<sup>20</sup>

Sebagai landasan terhadap kehujjahan *Ijma'* adalah firman Allah SWT berikut:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم<sup>21</sup>

### 4) *Qiyas*

*Qiyas* adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan *'illat* antara kedua kejadian atau peristiwa itu. *Qiyas* juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena ada persamaan *'illat* hukum karena dengan *Qiyas* ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya Al-Qur'an dan Hadits. Sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, tapi kadang juga bersifat tersirat yang terkandung dalam *nash*.<sup>22</sup>

## 2. Pemikiran Nahdlatul Wathan dalam Berpolitik

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>19</sup> QS. Al-Hasyr (59): 7.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>21</sup> QS. An-Nisa (4): 59.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 16.

Terjunnya Nahdlatul Wathan di dunia politik adalah salah satu cara Nahdlatul Wathan dalam menjalankan Dakwah Islamiyah, menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang benar sesuai dengan ajaran yang Nahdlatul Wathan pegang. Politik bukan merupakan tujuan dari Nahdlatul Wathan, tetapi politik digunakan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Kader-kader Nahdlatul Wathan masuk ke dalam pemerintahan guna memuluskan perjuangan mereka dalam hal ini berupa pendidikan, sosial dan Dakwah Islamiyah. Kader-kader Nahdlatul Wathan berusaha memegang posisi-posisi yang strategis guna memuluskan pergerakan Organisasi Nahdlatul Wathan.

Nahdlatul Wathan merupakan organisasi sosial keagamaan Islam yang bergerak pada bidang pendidikan, sosial dan dakwah. Dalam memperjuangkan tujuan-tujuan organisasi, Nahdlatul Wathan menggunakan pendidikan, sosial dan dakwah atau yang disebut dengan trilogi perjuangan sebagai kendaraan atau biasa mereka sebut alat. Tujuan organisasi Nahdlatul Wathan adalah *Lii'la'i Kalimatillah wa Izzil Islam wal Muslimin* dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat<sup>23</sup>. Tujuan organisasi tersebut harus dicapai dengan cara apapun, tetapi cara-cara tersebut tidak melanggar ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah 'ala Mazhabil Imamisy Syafi'i r.a radliyallahu 'anhu* yang merupakan asas yang digunakan oleh Organisasi Nahdlatul Wathan. Begitu pula bidang politik yang sekarang mulai diminati oleh berbagai kalangan juga menjadi alat Organisasi Nahdlatul Wathan guna mencapai tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh Organisasi Nahdlatul Wathan.

Dalam kiprahnya di dunia politik, Nahdlatul Wathan tidak menjadikan partai politik sebagai panutan melainkan sebagai kendaraan untuk melancarkan Nahdlatul Wathan masuk ke dunia politik. Karena Nahdlatul Wathan menganggap jika Nahdlatul Wathan tidak memiliki wakil atau kader yang duduk di kursi pemerintahan pusat atau legislatif, maka segala pembangunan dan perjuangan dakwah yang dijalankan Nahdlatul Wathan akan terhambat dan mengalami kesulitan. Nahdlatul Wathan selalu mengusung kader-kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Nahdlatul Wathan. Kader-kader yang diusung juga harus bisa

---

<sup>23</sup> Abdul Hayyi Nu'man, Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan.*, hlm. 100.

memperjuangkan Kittah, Visi dan Misi Nahdlatul Wathan ketika sudah duduk di kursi pemerintahan serta dalam menjalankan fungsinya tidak menyimpang dari AD/ART Nahdlatul Wathan.<sup>24</sup>

Bagi Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang merupakan anak dari Rauhun sekaligus cucu dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, dakwah ditempuh dengan dua cara, kultural dan struktural. Beliau menyebut dakwah kultural sebagai “berpolitik dengan dakwah” dan dakwah struktural sebagai “berdakwah dengan politik”. Terjunnya Nahdlatul Wathan ke dalam dunia politik adalah cerminan dari dakwah struktural. Demi dakwah struktural dan tuntutan massa itulah, Nahdlatul Wathan harus masuk dalam pemerintahan untuk mengembangkan Nahdlatul Wathan. Dengan masuk ke dalam sistem pemerintahan, maka aktivitas dakwah dapat disebarluaskan. Inilah yang dalam Islam dikenal *as-siyasah asy-syar’iyyah* yaitu politik sebagai alat dakwah.<sup>25</sup>

Selain untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, dalam berpolitik Nahdlatul Wathan juga ingin menebarkan rasa keadilan dan melaksanakan amanah dalam proses pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan Indonesia yang saat ini semakin jauh dari rasa keadilan. Wakil-wakil rakyat yang saat ini hanya mementingkan jabatan dan kekuasaan serta wakil-wakil rakyat yang hanya mementingkan kelompok-kelompok sendiri ketimbang memikirkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

### **3. Tindakan Politik Dinamika Nahdlatul Wathan Pasca Pemilu Era Orde Baru Sampai Pemilu 2014**

#### **1) Tindakan Politik Dinamika Nahdlatul Wathan Pancor**

Pasca terjadinya konflik intern di tubuh Organisasi Nahdlatul Wathan yang puncaknya pada Mukhtamar Nahdlatul Wathan ke-10 pada tahun 1998 yang dimenangkan kubu yang saat ini disebut Nahdlatul Wathan Anjani, Nahdlatul Wathan Pancor memilih untuk tetap menggunakan daerah Pancor sebagai pusat Organisasi yang merupakan tempat kelahiran Nahdlatul Wathan. Nahdlatul Wathan Pancor terus meningkatkan pembangunan dan pengembangan

---

<sup>24</sup>Dr. H. Abdurrahman Fajri, M.Pd.I. Beliau merupakan Anggota Dewan Muhtasar Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur. Wawancara tanggal 30 Maret 2015.

<sup>25</sup>Zulkarnain, *Tuan Guru Bajang: Berpolitik dengan Dakwah dan Berdakwah dengan Politi*, (Kediri: Kaysamedia, 2009) hlm. 59.

kualitas lembaga pendidikan yang telah ada di Pancor. Mereka juga merehab gedung-gedung sekolah yang sudah tua atau tidak layak pakai dengan membangun gedung-gedung baru bertingkat.<sup>26</sup>

Karena keinginan organisasi yang tidak hanya berdakwah di Lombok atau Nusa Tenggara Barat Saja, tetapi ingin melanjutkan perjuangan dakwahnya ke luar Nusa Tenggara Barat, sehingga Nahdlatul Wathan Pancor terjun meneruskan dakwah Islamiyahnya di dunia politik yang pada masa kepemimpinan TGKH. Zainuddin sudah mulai merambah ke dunia politik. Seperti kata Tuan Guru Bajang sebagai ketua umum Nahdlatul Wathan Pancor, jika berdakwah dengan politik itu sangat diperlukan, karena para pemimpin umat dipercaya untuk terlibat dalam struktur pemerintahan guna membangun masyarakat politik yang beradab dan berkeadilan. Jadi politik bukan semata-mata sebagai tujuan dalam pergerakan Nahdlatul Wathan Pancor, melainkan sebagai alat untuk berdakwah. Jika tidak menggunakan politik sebagai alat untuk berdakwah, maka pergerakan dan pembangunan Nahdlatul Wathan tidak akan berkembang dan hanya sebatas berdiri di Pancor saja.<sup>27</sup>

Pasca munculnya konflik intern pada tubuh Nahdlatul Wathan dan pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru, Nahdlatul Wathan Pancor terus aktif dalam dunia politik guna memuluskan perjuangan Nahdlatul Wathan. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru membuka peluang untuk Nahdlatul Wathan Pancor berafiliasi dengan partai politik lain yang awalnya Nahdlatul Wathan berafiliasi dengan Golkar. Selama Nahdlatul Wathan berafiliasi dengan Golkar, Golkar tidak menepati janji-janji atau kesepakatan yang pernah ditawarkan pada Nahdlatul Wathan. Contohnya pada pemilu, kader-kader Nahdlatul Wathan yang diusung Golkar ditempatkan pada nomor urut yang tidak pasti seperti misalnya nomor 5 sampai 10. Nomor urut diberikan oleh Partai Golkar kepada kader-kader Nahdlatul Wathan tersebut merupakan nomor yang tanggung antara terpilih atau tidak terpilih dan kemungkinan besar tidak terpilih karena kemungkinan besar calon yang terpilih antara nomor 1 sampai 5. Sehingga pada legislatif, Nahdlatul Wathan hanya memiliki 1 atau 2 wakil dan wakil yang lainnya merupakan kader-kader Partai

---

<sup>26</sup> Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan*, hlm. 5.

<sup>27</sup> Zulkarnain, *Tuan Guru Bajang*, hlm. 5.

Golkar. Ketidak pastian dan tidak terpenuhinya janji-janji atau kesepakatan yang telah disepakati merupakan alasan untuk Nahdlatul Wathan Pancor untuk beralih afiliasi dengan partai politik lain.<sup>28</sup>

Sebagai kendaraan politik untuk mencapai posisi-posisi yang strategis di legislatif pada Pemilu 1999, Nahdlatul Wathan Pancor berafiliasi dengan Partai Daulat Rakyat (PDR) yang merupakan salah satu partai baru yang mengikuti pemilu pada Pemilu 1999.<sup>29</sup> Partai Daulat Rakyat merupakan partai yang menitik beratkan pada sistem ekonomi yang maju dan adil. Partai Daulat Rakyat juga didirikan sebagai wadah bagi anak bangsa dalam menentukan proses reformasi untuk membangun sistem politik yang demokratis. Sehingga basis pendukung Partai Daulat Rakyat adalah para pekerja, petani, nelayan, pedagang kaki lima dan sektor informal, serta golongan masyarakat lainnya yang selama ini terpinggirkan.

Nahdlatul Wathan Pancor memilih bekerjasama dengan Partai Daulat Rakyat dari sekian banyak partai yang bermunculan pasca Orde Baru runtuh karena Partai Daulat Rakyat memberikan janji posisi-posisi yang strategis di legislatif yang merupakan tujuan Nahdlatul Wathan Pancor terjun ke dunia politik untuk melancarkan pergerakan Organisasi Nahdlatul Wathan Pancor. Partai Daulat Rakyat juga siap untuk mengakomodir keinginan-keinginan Nahdlatul Wathan. Nahdlatul Wathan Pancor lebih memilih Partai Daulat Rakyat sebagai mitra politik karena banyak kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor yang berada di koperasi yang merupakan basis pendukung Partai Daulat Rakyat. Kader-kader yang ada berada dalam kepengurusan koperasi mengusulkan untuk berafiliasi dengan Partai Daulat Rakyat yang sudah ada pada basis pendukung Partai Daulat Rakyat. Sedangkan Partai Daulat Rakyat mendapat keuntungan dari kerjasamanya dengan Nahdlatul Wathan Pancor berupa meningkatnya perolehan suara pada Pemilu 1999 mengingat

---

<sup>28</sup>Dr. Fauzan, M.Pd memegang jabatan sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan sebagai dosen perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Wathan. Wawancara tanggal 2 April 2015.

<sup>29</sup>H. Azhar, BA memegang jabatan sebagai Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur dan salah satu kader dari Partai Golkar. Wawancara tanggal 29 Maret 2015.

Nahdlatul Wathan merupakan organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat khususnya Pulau Lombok.<sup>30</sup>

Akan tetapi pada Pemilu 1999, Partai Daulat Rakyat dengan nomor urut 39 hanya mendapat suara 427.854 suara atau 0,40% dari keseluruhan suara yang ada sehingga Partai Daulat Rakyat tidak masuk *Parlementary-Threshold* (PT). Pada Pemilu 1999, daerah pemilihan Lombok Timur untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur Partai Daulat Rakyat hanya mendapatkan 3 kursi. Sedangkan untuk DPRD Provinsi, Partai Daulat Rakyat juga hanya mendapat 3 kursi.<sup>31</sup> Akibatnya tidak ada kader Nahdlatul Wathan Pancor yang duduk di kursi legislatif pada saat itu. Hal ini lah yang mengakibatkan Nahdlatul Wathan Pancor memutuskan untuk beralih afiliasi dengan partai politik lain yang bisa memenuhi keinginan Nahdlatul Wathan Pancor. Sehingga pada Pemilu 2004, Nahdlatul Wathan Pancor memilih untuk berafiliasi dengan partai lain yaitu Partai Bulan Bintang (PBB).<sup>32</sup>

Pada Pemilu 2004 Nahdlatul Wathan Pancor memilih untuk berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang tidak terlepas dari sejarah awal mula kader Nahdlatul Wathan berkiprah dalam dunia politik dengan partai politik. Partai Bulan Bintang yang merupakan turunan dari Partai Masyumi yang memang sejak lama memiliki ikatan emosional dengan Nahdlatul Wathan karena relasi yang dibangun antara Nahdlatul Wathan dengan Partai Masyumi saat awal kemerdekaan Republik Indonesia. Terpilihnya pendiri Nahdlatul Wathan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid menjadi perwakilan konstituante Indonesia bagian timur pada masa Orde Lama dan perwakilan MPR di masa Orde Baru dari Partai Masyumi merupakan sejarah awal kiprah Nahdlatul Wathan di dunia politik. Jadi bisa dikatakan bergabungnya kader Nahdlatul Wathan Pancor dengan Partai Bulan Bintang didasari dari ikatan emosional atau hubungan batin yang sudah terjalin sejak awal, sehingga Nahdlatul Wathan dan Partai Bulan Bintang dapat dengan mudah menyatukan

---

<sup>30</sup>Dr. Fauzan, M.Pd memegang jabatan sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan sebagai dosen perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Wathan. Wawancara tanggal 2 April 2015.

<sup>31</sup>M. Mugni Sn, *Ibu Rumah Tangga Getarkan Lombok: Biografi Ummuna Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid*, (Banten: CV Dunia Kata, 2013), hlm. 230.

<sup>32</sup>H. Masudi Rahman, M.Pd.I memegang jabatan sebagai Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur. Wawancara tanggal 30 Maret 2015.

Visi dan Misi mereka kedepan dalam membangun relasi politik yang tentunya bisa saling menguntungkan. Partai Bulan Bintang juga menawarkan pada Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Pancor untuk menjadi anggota DPR-RI. Di sisi lain Partai Bulan Bintang memiliki daya tarik yaitu Partai Bulan Bintang merupakan partai yang sudah mendapat peringkat 6 besar dalam skala Nasional dalam Pemilu tahun 1999.<sup>33</sup>

Relasi yang dibangun Nahdlatul Wathan Pancor dengan Partai Bulan Bintang memberikan perolehan yang signifikan untuk Partai Bulan Bintang di Nusa Tenggara Barat. Pada Pemilu 2004, Partai Bulan Bintang di Kabupaten Lombok Timur mendapat 8 kursi dan untuk tingkat Provinsi Partai Bulan Bintang mendapatkan 6 kursi.<sup>34</sup> Pada Pemilu 2004, Partai Bulan Bintang membawa kader Nahdlatul Wathan Pancor menjadi wakil dari Partai Bulan Bintang di DPR-RI yaitu Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Pancor. Hal ini membuat Nahdlatul Wathan Pancor berkeinginan untuk terus membangun relasi atau berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang pada Pemilu 2009.

Pada Pilkada gubernur dan bupati di Nusa Tenggara Barat 2008 hubungan relasi antara Nahdlatul Wathan Pancor dan Partai Bulan Bintang terus berlanjut. Partai Bulan Bintang dan kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor meminta kesediaan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi untuk menjadi calon gubernur dari Partai Bulan Bintang. Sedangkan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi sejak proses awal pencalonan dirinya menjadi gubernur beliau tidak berkeinginan untuk menjadi gubernur. Namun karena tuntutan umat dan kader Nahdlatul Wathan Pancor dan seiring berjalannya waktu, akhirnya Tuan Guru Bajang Zainul Majdi bersedia untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur dari Partai Bulan Bintang. Pada Pilkada tersebut Nahdlatul Wathan juga mengusung calon bupati dan wakil bupati yaitu Sukiman Azmy yang berpasangan dengan Syamsul

---

<sup>33</sup>Dr. Fauzan, M.Pd memegang jabatan sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan sebagai dosen perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Wathan. Wawancara tanggal 2 April 2015.

<sup>34</sup>M. Mugni Sn, *Ibu Rumah Tangga*, hlm. 235.

Lutfi.<sup>35</sup> Calon-calon yang diusung Nahdlatul Wathan Pancor pada Pilkada 2008 hanya didukung oleh dua partai politi, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meskipun calon-calon Nahdlatul Wathan Pancor hanya didukung oleh dua partai Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Sejahtera saja namun mereka berhasil memenangkan Pilkada di dua posisi tersebut, baik sebagai gubernur maupun sebagai bupati. Kemenangan Nahdlatul Wathan Pancor dalam Pilkada yang meraih posisi gubernur dan bupati mengalahkan calon lain yang diusung oleh Nahdlatul Wathan Anjani yang didukung oleh partai besar hasil koalisi Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Patriot. Tuan Guru Bajang dapat meraih posisi gubernur dan memenangkan Pilkada karena dia adalah cucu Tuan Guru Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan dan calon dari Nahdlatul Wathan Anjani sedang menjalanin proses kasus korupsi yang disangkakan kepadanya. Pada Pilkada 2013, Tuan Guru bajang Zainul Majdi kembali mencalonkan diri menjadi gubernur dan berhasil memenangkan posisi gubernur untuk periode kedua (2013-2018).<sup>36</sup>

Pada Pemilu 2009, Nahdlatul Wathan Pancor tetap berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang. Namun pada Pemilu 2009, perolehan suara nasional Partai Bulan Bintang menurun dan tidak mencapai 2,5% suara nasional. Sehingga Nahdlatul Wathan Pancor memutuskan untuk mengubah haluan mereka ke partai politik lain yang bisa mengakomodir keinginan Nahdlatul Wathan Pancor. Nahdlatul Wathan Pancor memutuskan untuk tidak berafiliasi lagi dengan Partai Bulan Bintang karena Tuan Guru Bajang selaku Ketua Umum PBNW Pancor menyerap aspirasi kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor yang ingin menjadi pengurus partai, bukan hanya menjadi kader atau anggota partai saja yang selalu mengikuti perintah pengurus-pengurus partai. Karena saat berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang, kader-kader Nahdlatul Wathan hanya

---

<sup>35</sup>Sukiman Azmy adalah alumni madrasah Nahdlatul Wathan, sedangkan Syamsul Lutfi adalah kakak dari Tuan Guru Bajang. Dia juga memegang jabatan sebagai Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur.

<sup>36</sup>Dr. Fauzan, MPd memegang jabatan sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan sebagai dosen perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Wathan. Wawancara tanggal 2 April 2015.

menjadi kader atau anggota partai saja. Karena posisi pengurus partai dapat memilih calon-calon yang maju dalam Pemilu ataupun Pilkada.

Pada Pemilu 2014, Nahdlatul Wathan Pancor memilih untuk beralih afiliasi dari Partai Bulan Bintang ke Partai Demokrat. Nahdlatul Wathan Pancor memilih berafiliasi dengan Partai Demokrat karena Partai Demokrat pada saat itu Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa. Karena Partai Demokrat adalah partai yang berkuasa pada saat itu, Partai Demokrat dapat mengakomodir keinginan-keinginan Nahdlatul Wathan Pancor yang ingin mencapai tujuan-tujuan Nahdlatul Wathan. Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa dapat melancarkan pembangunan-pembangunan Nahdlatul Wathan Pancor baik dari bidang pendidikan, bidang sosial maupun bidang Dakwah Islamiyah. Partai Demokrat juga menawarkan pada Tuan Guru Bajang Zainul Majdi memegang posisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat yang tentunya merupakan keinginan dari kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor yang ingin memegang jabatan yang penting dalam sebuah kepengurusan partai untuk dapat mencalonkan kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor untuk menjadi calon legislatif.<sup>37</sup>

## 2) Tindakan Politik Dinamika Nahdlatul Wathan Anjani

Setelah perpecahan dan konflik antara kubu yang saat ini disebut Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani semakin tajam pasca Mukhtamar Nahdlatul Wathan ke-10, kubu yang memenangkan Mukhtamar Nahdlatul Wathan ke-10 yaitu Nahdlatul Wathan Anjani pindah dari Desa Pancor yang merupakan pusat organisasi Nahdlatul Wathan sekaligus tempat kelahiran Nahdlatul Wathan. Nahdlatul Wathan Anjani pertama-tama pindah ke Desa Kalijaga pada tahun 1999 dan kemudian pindah lagi ke Desa Anjani di tahun 2001. Kubu Nahdlatul Wathan Anjani menjadikan Desa Anjani sebagai pusat organisasi untuk menjalankan kegiatan pendidikan, sosial dan dakwah.<sup>38</sup> Berbeda dengan Nahdlatul Wathan Pancor yang meneruskan pembangunan organisasi baik bangunan

---

<sup>37</sup>Dr. Fauzan, M.Pd memegang jabatan sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan sebagai dosen perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Wathan. Wawancara tanggal 2 April 2015.

<sup>38</sup> Saipul Hamdi, *Nahdlatul Wathan*, hlm. 5.

atau kepengurusan yang sudah ada, Nahdlatul Wathan Anjani memulai dari nol dalam membangun kembali Nahdlatul Wathan di Desa Anjani. Tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan ideologi-ideologi organisasi, Nahdlatul Wathan Anjani tetap berpegang teguh pada ideologi-ideologi yang diterapkan oleh TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan.

Dalam perkembangannya, Nahdlatul Wathan Anjani memiliki misi untuk mengembangkan organisasi-organisasi pendidikan Nahdlatul Wathan sebagai sarana Dakwah Islamiyah. Organisasi pendidikan yang ingin dikembangkan oleh Nahdlatul Wathan Anjani tidak hanya bertempat di daerah Lombok atau Nusa Tenggara Barat saja, tetapi Nahdlatul Wathan Anjani berkeinginan untuk memperluas cakupan pembangunan organisasi pendidikan Nahdlatul Wathan di berbagai provinsi bahkan keluar negeri. Nahdlatul Wathan Anjani juga ingin mengembangkan pergerakan dakwah ke berbagai pelosok nusantara guna menegakkan ajaran-ajaran Islam yang saat ini mulai tergerus oleh perkembangan zaman.

Untuk tercapainya misi dan tujuan organisasi yang disampaikan di atas, Nahdlatul Wathan Anjani menggunakan alat berupa politik untuk melancarkan tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Seperti pergerakan yang dilakukan oleh TGKH. Zainuddin yang berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam aktivitas politik. Nahdlatul Wathan Anjani tetap berperan aktif dalam aktivitas politik pasca meninggalnya TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan. Dalam aktivitas politiknya, Nahdlatul Wathan Anjani berafiliasi dengan partai politik untuk mencapai posisi-posisi penting dalam pemerintahan guna memuluskan pergerakan Nahdlatul Wathan di kancah nasional. Pada setiap pemilu pasca Orde Baru, Nahdlatul Wathan Anjani selalu berganti-ganti mitra politik sesuai dengan perubahan politik nasional yang selalu berkembang.<sup>39</sup>

Pada pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pasca wafatnya TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Wathan Anjani tetap terus mendukung Partai Golkar (Partai Golongan Karya) yang memang sebelum pecahnya kepemimpinan

---

<sup>39</sup>Drs. H. Azharlillail, M.Pd.I memegang jabatan sebagai Kabiro IAIH NW Lombok Timur dan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur NTB. Wawancara tanggal 28 Maret 2015.

Nahdlatul Wathan dan pada saat kepemimpinan TGKH. Zainuddin, Nahdlatul Wathan sudah berafiliasi dengan Golkar ketika Orde Baru masih berkuasa. Karena masih terdapat ikatan emosional antara Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani dengan Golkar sehingga Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani memutuskan untuk tetap berafiliasi dengan Golkar. Nahdlatul Wathan Anjani dalam menentukan afiliasinya juga mempertimbangkan keadaan psikologi masyarakat atau pengikut-pengikut Nahdlatul Wathan Anjani yang mayoritas merupakan kalangan menengah kebawah. Pengikut-pengikut Nahdlatul Wathan Anjani yang mayoritas berpendidikan rendah kurang mengerti masalah dunia politik secara psikologis terbiasa memilih Partai Golkar sebagai partai pilihan dalam Pemilu. Bergabungnya Nahdlatul Wathan Anjani dengan Partai Golkar karena adanya janji-janji dari Partai Golkar untuk Nahdlatul Wathan Anjani memegang posisi-posisi penting pada pemerintahan.<sup>40</sup>

Dari sisi Partai Golkar, bekerjasama dengan Nahdlatul Wathan memiliki keuntungan yang sangat besar mengingat Nahdlatul Wathan merupakan organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di Lombok bahkan Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat menunjang jumlah suara yang didapat oleh Partai Golkar pada saat Pemilu. Pada Pemilu 1999 contohnya, daerah pemilihan Lombok Timur, Golkar mendapat 18 kursi untuk DPRD Kabupaten Lombok Timur. Untuk DPRD Provinsi, Golkar mendapat 15 kursi. Pada pemilu ini, Umi Hj. Sitti Raihanun yang merupakan anak dari TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani terpilih menjadi salah satu dari lima anggota MPR utusan daerah Nusa Tenggara Barat dengan nomor anggota B-557. Dari pemaparan tersebut terbukti bahwa Nahdlatul Wathan Menunjang perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan pusat kepengurusan Nahdlatul Wathan.<sup>41</sup>

Pada Pemilu 2004, Nahdlatul Wathan Anjani beralih berafiliasi dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang merupakan partai baru pada Pemilu 2004. Bergabungnya Nahdlatul Wathan

---

<sup>40</sup> Dr. H. M. Mugni Sn, M.Pd., M.Kom merupakan Ketua STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani. Wawancara tanggal 02 April 2015.

<sup>41</sup> M. Mugni Sn, *Ibu Rumah Tangga.*, hlm. 231.

Anjani dengan Partai Bintang Reformasi berawal dari aspirasi kader Nahdlatul Wathan yang menginginkan agar kader Nahdlatul Wathan menjadi pemimpin tertinggi partai. Pada saat kepemimpinan TGKH. Zainuddin, kader-kader Nahdlatul Wathan tidak pernah menjadi pemimpin tertinggi partai atau pengurus yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Selama berafiliasi dengan Golkar, kader-kader Nahdlatul Wathan ditempatkan pada posisi-posisi yang tidak penting pada partai, sehingga Nahdlatul Wathan tidak bisa menentukan calon-calon legislatif dan nomor urutnya. Kader-kader Nahdlatul Wathan ditempatkan pada nomor urut antara jadi dan tidak jadi (nomor tanggung). Karena pada saat itu calon legislatif yang menjadi anggota legislatif masih menggunakan nomor urut yang nomor urut terkecil tidak dipegang oleh kader-kader Nahdlatul Wathan karena Nahdlatul Wathan tidak memiliki wewenang untuk menentukan calon legislatif dan nomor urutnya. Akibatnya kemungkinan hanya satu orang kader Nahdlatul Wathan yang duduk di legislatif.<sup>42</sup>

Dari keadaan tersebut, Nahdlatul Wathan Anjani menganggap Partai Golkar telah mengingkari janji-janji yang sebelumnya pernah mereka sepakati. Dan dari kejadian tersebut, Umi Hj. Sitti Raihanun terdorong untuk beralih mitra partai politik ke Partai Bintang Reformasi yang merupakan pecahan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai Bintang Reformasi<sup>43</sup> yang dideklarasikan oleh KH. Zainuddin MZ yang kebetulan juga mengenal TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan sekaligus menarik Umi Hj. Sitti Raihanun untuk bergabung dengan Partai Bintang Reformasi. Umi Hj. Sitti Raihanun juga tertarik dengan kharisma KH. Zainuddin MZ. Ketika datang di kediaman KH. Zainuddin MZ, Umi Hj. Sitti Raihanun ditawarkan menjadi tim deklarator Partai Bintang Reformasi pusat. Akan tetapi Umi gagal menjadi deklarator pusat dikarenakan suatu hal dan dinantikan menjadi deklarator untuk wilayah Nusa Tenggara Barat.

---

<sup>42</sup> Dr. H. M. Mugni Sn, M.Pd., M.Kom merupakan Ketua STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani. Wawancara tanggal 02 April 2015.

<sup>43</sup>Dalam proses pendaftaran di Depkumham, PPP Reformasi tidak lolos karena tidak boleh ada dua partai mempunyai nama yang sama. DPP PPP Reformasi disarankan untuk berganti nama. Saran ini pun diterima. Sehingga PPP Reformasi berganti nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR)

Kehadiran Partai Bintang Reformasi juga menarik tokoh-tokoh Nusa Tenggara Barat untuk menjadi deklarator wilayah Nusa Tenggara Barat. Sehingga dikeluarkannya SK tim deklarator Partai Bintang Reformasi wilayah Nusa Tenggara Barat yang beranggotakan 7 orang, yang terdiri atas (1) Umi Hj. Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid (NW); (2) TGH. Muhammad Saleh Ahmad (NW); (3) Drs. H. Abdul Hayyi Nu'man (NW); (4) H. Muh. Ali bin Dahlan, S.H. (LSM); (5) Dr. Yanis Maladi, MH. (akademisi); (6) Muh. Nasir, S.H. (LSM); dan (7) Lalu Sultan (Politikus). Dari konfigurasi deklarator Partai Bintang Reformasi wilayah Nusa Tenggara Barat, tokoh Nahdlatul Wathan hanya 3 orang dan 4 orang dari luar Nahdlatul Wathan. Akibatnya bila diadakan *voting*, maka Nahdlatul Wathan akan kalah suara sehingga kepemimpinan tidak mungkin dipegang oleh kader Nahdlatul Wathan. Oleh karena itu, Umi Hj. Sitti Raihanun melakukan pendekatan kepada 2 orang tim deklarator yang lain, yaitu Pak Ali dan Pak Yanis agar mereka bersedia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada kader Nahdlatul Wathan dan merekapun setuju.

Dalam kepemimpinan Partai Bintang Reformasi di wilayah Nusa Tenggara Barat sebagian besar dipegang oleh kader-kader Nahdlatul Wathan. Dalam pemilu 2004, Partai Bintang Reformasi mendapat 7 kursi untuk Kabupaten Lombok Timur yang semua diisi oleh kader Nahdlatul Wathan dan 5 kursi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 4 diantaranya adalah kader Nahdlatul Wathan. Keberhasilan juga didapat Nahdlatul Wathan Anjani dalam perebutan kursi legislatif. Keberhasilan 31 orang kader Nahdlatul Wathan menjadi anggota legislatif merupakan fenomena yang luar biasa karena tidak pernah terjadi selama Nahdlatul Wathan terjun di dunia politik. Sekalipun saat TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan masih memimpin, kader Nahdlatul Wathan tidak banyak mendapat kesempatan menjadi anggota legislatif.<sup>44</sup>

Atas keberhasilan tersebut, Nahdlatul Wathan Anjani pada Pemilu 2009 tetap berafiliasi dengan Partai Bintang Reformasi. Kesuksesan-kesuksesan yang dicapai pada Pemilu 2004 menjadikan Nahdlatul Wathan Anjani tertarik untuk terus menjalin kerjasama dalam bidang politik. Begitu juga dengan Partai Bintang Refotmasi

---

<sup>44</sup> M. Mugni Sn, *Ibu Rumah*, hlm. 233.

yang tetap ingin menjalin kerjasama dengan Nahdlatul Wathan Anjani, karena Nahdlatul Wathan Anjani memberikan pemasukan suara yang sangat mencolok mengingat Nahdlatul Wathan merupakan organisasi sosial keagamaan Islam terbesar di Lombok bahkan Nusa Tenggara Barat. Nahdlatul Wathan Anjani dan Partai Bintang Reformasi terus menjalin kerjasama dalam bidang politik karena keduanya mendapatkan keuntungan yang nyata dari hasil kerjasama keduanya pada pemilu 2004.

Pada Pemilu 2009, Nahdlatul Wathan Anjani tetap berafiliasi dengan Partai Bintang Reformasi dan pada seluruh kepengurusan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kader Nahdlatul Wathan yang menjadi pengurusnya. Khusus untuk Pulau Lombok, semua pengurus intinya dipegang oleh kader Nahdlatul Wathan. Akan tetapi, pada Pemilu 2009 perolehan suara Partai Bintang Reformasi menurun drastis bila dibandingkan dengan Pemilu 2004 dan pada Pemilu tahun 2009 jumlah anggota legislatif dari Partai Bintang Reformasi menurun menjadi 22 orang. Bahkan Partai Bintang Reformasi tidak masuk *Parlementary-Threshold* (PT) yang mengakibatkan suara Partai Bintang Reformasi untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat yang berada pada posisi ke-5 menjadi batal.<sup>45</sup>

Dalam Pemilu tahun 2009 Partai Bintang Reformasi mengalami penurunan perolehan suara karena menurut pendapat beberapa tokoh Nahdlatul Wathan, Pengurus Partai Bintang Reformasi tidak tepat memilih calon legislatif. Calon legislatif yang menjadi wakil pada Pemilu 2004 tidak memberikan kontribusi signifikan kepada perjuangan Nahdlatul Wathan. Wakil-wakil Partai Bintang Reformasi tidak mampu berbicara lebih di lembaga legislatif karena mereka bukanlah ahli politik. Banyak di antara mereka hanya ahli dalam bidang agama, sehingga di gedung DPRD, mereka lebih banyak ditugasi memimpin doa oleh pemimpin DPRD. Pada Pemilu 2009, Partai Bintang Reformasi juga semakin tidak cerdas dalam menempatkan calon-calon anggota legislatif karena kualifikasi Sumber Daya Manusianya (SDM) rendah dan tidak melihat ketokohan seseorang di daerah tersebut. Seperti untuk Dapil Pulau Sumbawa, pada Pemilu 2009, Partai Bintang Reformasi meletakkan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 237

orang Lombok yang tidak dikenal oleh orang Pulau Sumbawa oleh karena itu sangatlah wajar bila Dapil Sumbawa pada Pemilu 2009 Partai Bintang Reformasi tidak mendapat apa-apa.<sup>46</sup> Selain itu, ada pula anggota legislatif usungan Partai Bintang Reformasi yang tidak loyal dengan kebijakan Umi Hj. Sitti Raihanun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan mengingat Umi lah yang membawa Partai Bintang Reformasi ke Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2011, Partai Bintang Reformasi menyatakan diri bergabung dengan Partai Gerindra karena Partai Bintang Reformasi pada Pemilu 2009 tidak masuk *Parlementary-Threshold* (PT). DPP PBR menginstruksikan seluruh jajaran pengurus di daerah harus langsung bergabung dengan kepengurusan Partai Gerindra. Instruksi ini juga langsung direspons oleh Pengurus PBR Nusa Tenggara Barat yang seluruh kepengurusannya dipegang oleh kader-kader Nahdlatul Wathan. Kader-kader Nahdlatul Wathan menyusun langkah-langkah untuk meraih posisi-posisi yang strategis dalam kepengurusan Partai Gerindra di Nusa Tenggara Barat. Kader-kader Nahdlatul Wathan berusaha untuk meraih posisi pengurus seperti Ketua atau Sekretaris di Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat.

Dalam perjuangan meraih kepengurusan di Partai Gerindra, ternyata pengurus Gerindra tidak rela memberikan kesempatan kepada kader-kader Nahdlatul Wathan untuk menjadi pengurus dalam posisi strategis (Ketua/Sekretaris) mengingat sebelum Partai Bintang Reformasi bergabung dengan Partai Gerindra, di Nusa Tenggara Barat Partai Gerindra telah memiliki kepengurusan sendiri. Hal ini menimbulkan terjadi konflik dan dualisme kepengurusan di banyak daerah dalam Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat. Sampai menjelang dimulainya pendaftaran partai peserta Pemilu 2014, konflik dan dualisme kepengurusan yang terjadi dalam Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat tidak kunjung mereda. Ketua Umum DPP Partai Gerindra sudah beberapa kali mencoba untuk mengatasi dualisme kepengurusan antara pengurus lama dengan pengurus yang dipegang oleh kader Nahdlatul Wathan tapi tidak menemui titik temu. Hingga akhirnya DPP Gerindra membekukan kepengurusan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 239.

Partai Gerindra di bawah kepengurusan kader Nahdlatul Wathan dan mengembalikan kepengurusan ke pengurus lama.<sup>47</sup>

Akibat dari kejadian yang terjadi dalam kepengurusan Partai Gerindra, Nahdlatul Wathan Anjani pada Pemilu 2014 tidak mempunyai partai secara struktural organisatoris. Sehingga Umi Hj. Sitti Raihanun membebaskan kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani untuk masuk kepartai manapun agar Nahdlatul Wathan Anjani memiliki banyak wakil-wakil yang duduk di kursi legislatif mengingat Nahdlatul Wathan Anjani tidak memiliki kepengurusan lagi di partai manapun. Akhirnya pada Pemilu 2014 kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani sebagian masuk ke Partai Hanura dan sebagian lagi masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagian lainnya masuk ke partai-partai yang menurut para kader tersebut membawa keuntungan bagi Nahdlatul Wathan. Kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani dalam pilihan partai politik memang dibebaskan, tetapi kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani tetap berpegang teguh dengan Kittah Perjuangan Nahdlatul Wathan dan asas-asas Nahdlatul Wathan itu sendiri.

Sebagian kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani masuk ke Partai Hanura memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya yaitu, Partai Hanura pada Pemilu 2014 berkoalisi dengan Partai Demokarasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjalin kerjasama dengan Jusuf Kalla. Jusuf Kalla akhirnya juga bekerjasama dengan Nahdlatul Wathan Anjani dalam Pilpres dan keuntungan yang didapat Nahdlatul Wathan Anjani adalah bahwa Jusuf Kalla merupakan tokoh di Sulawesi dimana cukup banyak kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani yang berada di Sulawesi. Dengan adanya Jusuf Kalla akan memudahkan Nahdlatul Wathan Anjani untuk mengurus kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani yang berada di Sulawesi. Majunya Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden juga membawa angin segar bagi Nahdlatul Wathan Anjani, karena jika Jusuf Kalla terpilih menjadi Wakil Presiden akan memudahkan

---

<sup>47</sup> Dr. H. M. Mugni Sn, M.Pd., M.Kom merupakan Ketua STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani. Wawancara tanggal 02 April 2015.

Nahdlatul Wathan Anjani dalam menjalankan pembangunan dan perjuangan dakwahnya.<sup>48</sup>

Sementara sebagian kader Nahdlatul Wathan Anjani berafiliasi dengan Partai Hanura, sebagian kader yang lain berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebagian kader memilih untuk berafiliasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa karena adanya ikatan emosional antara Nahdlatul Wathan dengan Partai Kebangkitan Bangsa. TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan pernah diangkat sebagai konsulat Nahdlatul Ulama pada tahun 1950-an mewakili Pulau Sunda Kecil. Atas perjalanan sejarah tersebut terdapat ikatan emosional antara Nahdlatul Wathan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh Ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Dalam kerjasamanya Partai Kebangkitan Bangsa juga menawarkan kesepakatan atau janji-janji posisi-posisi yang strategis bagi Nahdlatul Wathan Anjani untuk melancarkan pembangunan dan perjuangan dakwahnya.

### **C. *Rational Choice* Mitra Politik Nahdlatul Wathan**

Dalam problematika kehidupan, baik individu maupun sekelompok individu selalu menggunakan pemikiran rasionalnya untuk memecahkan problematika yang sedang individu atau sekelompok individu tersebut hadapi. Dalam pemikiran rasionalnya, baik individu maupun sekelompok individu dalam melakukan tindakannya akan mencari cara yang terbaik bagi individu atau sekelompok individu tersebut untuk dilakukan. Tindakan tersebut dilakukan dengan pemikiran yang mereka gunakan untuk tercapainya kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai guna tercapainya kehidupan yang diidam-idamkan. Begitu pula problematika dalam ranah dunia perpolitikan dimana individu atau sekelompok individu yang memiliki kepentingan-kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu melakukan tindakan yang menurut mereka perlu atau terbaik untuk dilakukan guna tercapainya kepentingan atau tujuan tersebut. Terkadang politik bisa diartikan segala macam cara yang dilakukan individu atau sekelompok individu untuk mendapatkan sesuatu, menguasai sesuatu dan mencapai tujuan tertentu. Hal ini mengakibatkan

---

<sup>48</sup>Drs. H. Azharlillail, M.Pd.I memegang jabatan sebagai Kabiro IAIH NW Lombok Timur dan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur NTB. Wawancara tanggal 28 Maret 2015.

tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok individu selalu benar di mata politik.

Hal tersebut sesuai dengan *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional) yang bersumber dari ilmu ekonomi menyangkut keuntungan dan kerugian yang saat ini diterapkan pada ilmu politik. Teori pilihan rasional melihat perilaku memilih individu atau sekelompok individu dalam menentukan pilihannya. Dalam teori pilihan rasional, baik individu maupun sekelompok individu didorong oleh suatu keinginan, kepentingan atau bahkan tujuan yang mengungkapkan sebuah prioritas yang akan dipilih. Individu atau sekelompok individu akan bertindak atau memilih sesuai dengan tindakan atau pilihan yang diperlukan mengingat kendal yang akan dihadapi dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi di mana mereka akan bertindak. Jadi menurut teori pilihan rasional, individu atau sekelompok individu akan menentukan tindakan atau pilihan dengan efektif dan seefisien mungkin untuk mengurangi tingkat kerugian dan memaksimalkan keuntungan yang didapat.<sup>49</sup>

Teori pilihan rasional yang diterapkan pada ilmu politik objek kajiannya adalah melihat individu maupun sekelompok individu dalam menentukan pilihan atau tindakan. Contohnya saja individu atau sekelompok individu dalam menentukan pilihan partainya dalam sebuah Pemilu. Bagaimana individu atau sekelompok individu lebih memilih partai A dibanding partai B. Individu atau sekelompok individu tersebut memiliki kepentingan dan mereka dihadapkan pada pilihan partai A atau partai B. Setelah dibandingkan dan dipertimbangkan, individu atau sekelompok individu tersebut berkesimpulan bahwa kepentingan mereka akan lebih terakomodasi jika partai A berkuasa daripada jika partai B yang berkuasa. Dari situ akhirnya individu atau sekelompok individu tersebut memutuskan untuk memberikan dukungan mereka pada partai A. Ini sama ketika individu atau sekelompok individu dengan kebutuhan tertentu dihadapkan pada tawaran produk A atau produk B. Individu atau sekelompok individu tersebut akan mencoba membandingkan produk mana yang paling baik melayani kebutuhan mereka, dan pilihan akan dijatuhkan pada produk tersebut. Dalam contoh tersebut dapat dilihat dalam perilaku memilihnya, individu atau sekelompok individu menggunakan rasionalnya untuk menentukan pilihan mana yang

---

<sup>49</sup>David Marsh, Garry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 76.

membawa keuntungan atau maanfaat yang terbesar dan membawa kerugian paling sedikit.<sup>50</sup>

Teori pilihan rasional juga diterapkan oleh Organisasi sosial keagamaan Islam Nahdlatul Wathan yang saat ini memiliki dua kubu kepengurusan yaitu Nahdlatul Wathan Pancor dan nahdlatul Wathan Anjani. Baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani sama-sama menggunakan pilihan rasional dalam menentukan pada setiap Pemilu berafiliasi dengan partai politik apa, karena baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani memiliki kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai dalam ranah politik. Adanya kepentingan-kepentingan Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani yang ingin terpenuhi berkaitan erat dengan partai politik karena partai politik yang mereka pilih harus dapat memenuhi kepentingan-kepentingan yang ingin Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani capai.

Nahdlatul Wathan terjun di dunia politik merupakan suatu bentuk melanjutkan perjuangan untuk pembangunan dalam bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang dakwah. Seperti pendapat Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Pancor sekaligus cucu dari TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan bahwa terjunnya Nahdlatul Wathan di dunia politik merupakan bentuk dari dakwah struktural atau berdakwah dengan politik, karena Tuan Guru Bajang beranggapan bahwa berdakwah dengan politik sangatlah penting karena dengan politik pembangunan Nahdlatul Wathan akan semakin maju dan semakin luas.<sup>51</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, kader-kader Nahdlatul Wathan harus bisa duduk di kuris pemerintahan atau legislatif guna memperlancar pembangunan dan penyebaran ajaran-ajaran Nahdlatul Wathan ke seluruh pelosok Indonesia bahkan keluar negeri. Untuk mendapatkan kuris di pemerintahan atau legislatif, Nahdlatul Wathan perlu memiliki kendaraan untuk bisa mencapai posisi-posisi yang strategis di pemerintahan atau legislatif. Partai politik adalah satu-satunya kendaraan yang bisa digunakan oleh Nahdlatul Wathan untuk mencapai posisi-posisi tersebut karena sistem Negara Indonesia yang mengharuskan baik individu atau sekelompok individu yang ingin duduk di kursi pemerintahan atau legislatif harus melalu partai politik terlebih

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>51</sup> Zulkarnain, *Tuan Guru Bajang*, hlm. 5.

dahulu.<sup>52</sup> Hal ini lah yang mendasari Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Wathan Anjani untuk menggunakan rasionalnya dalam memilih partai politik mana yang dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dan partai politik mana yang memberi kerugian paling sedikit bahkan tidak memberi kerugian sama sekali.

Teori pilihan rasional tercermin dari partai politik yang dipilih baik oleh Nahdlatul Wathan Pancor atau Nahdlatul Wathan Anjani pada Pemilu 1999. Nahdlatul Wathan Pancor memilih Partai Daulat Rakyat karena Partai Daulat Rakyat memberikan janji-janji yang salah satunya akan mengakomodir semua keinginan dari Nahdlatul Wathan Pancor karena dari mitra politik sebelumnya yaitu Partai Golkar telah mengingkari janji-janji yang ditawarkan pada Nahdlatul Wathan Pancor.<sup>53</sup> Dari janji tersebut, Nahdlatul Wathan menggunakan rasionalnya untuk memilih Partai Daulat Rakyat karena keuntungan tersebut. Apalagi ada kader Nahdlatul Wathan yang berada di basis pendukung Partai Daulat Rakyat sehingga mudah untuk menyatukan suara dari kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor.<sup>54</sup>

Sedangkan Nahdlatul Wathan Anjani memilih untuk tetap berafiliasi dengan Partai Golkar karena memiliki beberapa keuntungan tersendiri daripada berafiliasi dengan partai politik lain. Nahdlatul Wathan Anjani memilih berafiliasi dengan Partai Golkar karena Partai Golkar menawarkan janji-janji akan menempatkan kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani di kursi pemerintahan atau legislatif. Keuntungan lain berafiliasi dengan Partai Golkar dapat dengan mudah menyatukan visi dan misi karena ikatan emosional yang terjalin akibat perjalanan sejarah antara Nahdlatul Wathan Anjani dengan Partai Golkar. Dari faktor sejarah tersebut juga berpengaruh pada kader dan umat Nahdlatul Wathan Anjani

---

<sup>52</sup>Drs. H. Azharlillail, M.Pd.I memegang jabatan sebagai Kabiro IAIH NW Lombok Timur dan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur NTB. Wawancara tanggal 28 Maret 2015.

<sup>53</sup>H. Azhar, BA memegang jabatan sebagai Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur dan salah satu kader dari Partai Golkar. Wawancara tanggal 29 Maret 2015.

<sup>54</sup>Dr. Fauzan, M.Pd memegang jabatan sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan sebagai dosen perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Wathan. Wawancara tanggal 2 April 2015.

yang terbiasa memilih Partai Golkar sebagai partai pilihannya pada Pemilu sehingga tidak sulit untuk menyatukan suara pilihan partai.<sup>55</sup>

Pilihan mitra politik yang diambil oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani pada Pemilu 2004 dan 2009 juga mencerminkan teori pilihan rasional yaitu menentukan pilihan guna mendapatkan manfaat atau keuntungan terbesar dan kerugian terkecil. Pada Pemilu 2004 Nahdlatul Wathan Pancor memilih untuk berafiliasi dengan Partai Bulan Bintang karena Partai Bulan Bintang merupakan turunan dari Partai Masyumi yang memiliki nilai sejarah dengan Nahdlatul Wathan pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Karena faktor sejarah tersebut mengakibatkan mudahnya menyatukan visi dan misi antara Nahdlatul Wathan Pancor dengan Partai Bulan Bintang. Hal tersebut lantas tidak menghilangkan tujuan Nahdlatul Wathan berafiliasi dengan partai politik. Daya tarik Partai Bulan Bintang juga menawarkan posisi-posisi yang strategis di pemerintahan atau legislatif kepada kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor. Hal tersebut terbukti pada Pemilu 2004 banyak kader Nahdlatul Wathan Pancor yang duduk di pemerintahan atau legislatif. Bahkan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi selaku Ketua Umum PBNW Pancor sukses menduduki jabatan gubernur pada Pilkada 2008 untuk periode 2008-2013 sehingga hubungan relasi yang dibangun antara Nahdlatul Wathan Pancor dengan Partai Bulan Bintang berlanjut hingga Pemilu 2009.<sup>56</sup> Berlanjutnya hubungan relasi Nahdlatul Wathan Pancor dengan Partai Bulan Bintang karena terpenuhinya kepentingan kedua belah pihak sehingga teori pilihan rasional tercermin dari kejadian tersebut.

Sedangkan pada kubu Nahdlatul Wathan Anjani pada Pemilu 2004 beralih mitra politik karena Partai Golkar tidak memenuhi janji-janji yang dulu ditawarkan. Nahdlatul Wathan Anjani memilih berafiliasi dengan Partai Bintang Reformasi karena Partai Bintang Reformasi merupakan pecahan dari Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki ikatan sejarah dengan Nahdlatul Wathan pada masa Orde Baru. Kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani menginginkan kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani

---

<sup>55</sup>Dr. H. M. Mugni Sn, M.Pd., M.Kom merupakan Ketua STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani. Wawancara tanggal 02 April 2015.

<sup>56</sup>Dr. Fauzan, M.Pd memegang jabatan sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan sebagai dosen perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Wathan. Wawancara tanggal 2 April 2015.

menjadi pengurus tertinggi dalam sebuah partai. KH. Zainuddin MZ yang merupakan Pemimpin Partai Bintang Reformasi dan sangat mengenal TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan menawarkan pada Nahdlatul Wathan Anjani untuk menjadi pengurus tertinggi partai dan. Setelah kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani menjadi pengurus tertinggi di partai pada Pemilu 2004, 31 kader Nahdlatul Wathan menjadi anggota legislatif membuat Nahdlatul Wathan terus berafiliasi dengan Partai Bintang Reformasi pada Pemilu 2009 karena kepentingan-kepentingan dan janji-janji Partai Bintang Reformasi bisa dipenuhi.<sup>57</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa teori pilihan rasional sangatlah tercermin dari pilihan yang diambil Nahdlatul Wathan Anjani dalam memilih mitra politik karena sebuah kepentingan Nahdlatul Wathan Anjani bisa terpenuhi dengan memilih Partai Bintang Reformasi daripada saat berafiliasi dengan Partai Daulat Rakyat.

Teori pilihan rasional juga tercermin pada perilaku memilih Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam menentukan akan berafiliasi dengan partai apa pada Pemilu 2014. Baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani pada Pemilu 2014 mengubah haluan mereka untuk berafiliasi dengan partai politik lain karena mitra partai politik mereka pada Pemilu 2009 gagal meraih suara 2,5% suara nasional.<sup>58</sup> Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani tidak mau mengambil kerugian berafiliasi dengan partai politik yang tidak lolos pada Pemilu. Hal ini mencerminkan bahwa Nahdlatul Wathan menggunakan rasionalnya untuk menentukan pilihan agar kerugian dapat diminimalisir.

Untuk menghindari kerugian dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, Nahdlatul Wathan Pancor memilih untuk berafiliasi dengan partai politik lain. Pada Pemilu 2014 Nahdlatul Wathan Pancor memilih untuk berafiliasi dengan Partai Demokrat yang notabenehnya merupakan partai penguasa pada saat itu. Karena Partai Demokrat merupakan partai penguasa maka Nahdlatul Wathan Pancor lebih memilih Partai Demokrat daripada partai politik lain agar kepentingan-kepentingan Nahdlatul Wathan Pancor bisa tercapai. Nahdlatul Wathan Pancor beranggapan bahwa posisi Partai Demokrat yang saat itu berkuasa akan mempermudah

---

<sup>57</sup>Dr. H. M. Mugni Sn, M.Pd., M.Kom merupakan Ketua STMIK Syaikh Zainuddin NW Anjani Lombok Timur dan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan Anjani. Wawancara tanggal 02 April 2015.

<sup>58</sup>M. Mugni Sn, *Ibu Rumah Tangga*, hlm. 238.

kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor untuk masuk ke dalam legislatif. Selain itu Partai Demokrat juga menawarkan posisi-posisi penting dalam kepengurusan partai terutama posisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat yang di tawarkan pada Tuan Guru Bajang Zainul Majdi selaku Ketua Umum PBNW Pancor. Tawaran tersebut diterima oleh Nahdlatul Wathan Pancor karena sebelumnya kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor berkeinginan untuk memegang posisi-posisi penting dalam kepengurusan partai untuk melancarkan mewujudkan tujuan Nahdlatul Wathan Pancor.<sup>59</sup>

Sedangkan Nahdlatul Wathan Anjani pada Pemilu 2014 memilih untuk membebaskan kader-kadernya untuk berafiliasi dengan partai politik apa karena pasca pembekuan kepengurusan kader Nahdlatul Wathan Anjani pada Partai Gerindra karena konflik yang terjadi antara kepengurusan Nahdlatul Wathan Anjani dengan kepengurusan kader Partai Gerindra. Hal ini mengakibatkan pada Pemilu 2014, Nahdlatul Wathan Anjani tidak memiliki partai secara struktural organisatoris sehingga Nahdlatul Wathan Anjani membebaskan kader-kadernya untuk masuk ke partai politik manapun agar kader Nahdlatul Wathan Anjani banyak yang masuk ke legislatif. Pada Pemilu 2014 sebagian kader Nahdlatul Wathan Anjani masuk ke Partai Hanura dan sebagian lagi masuk ke Partai Kebangkitan Bangsa.

Dari Partai Hanura dan Partai Kebangkitan Bangsa memiliki daya tarik dan keuntungan tersendiri sehingga kader-kader Nahdlatul Wathan Anjani memilih untuk masuk ke dalam kedua partai tersebut. Seperti Partai Hanura yang memiliki daya tarik bagi Nahdlatul Wathan Anjani karena Partai Hanura berkoalisi dengan PDIP dan PDIP yang berkoalisi dengan Jusuf Kalla yang berasal dari Sulawesi sehingga Nahdlatul Wathan Anjani bisa meneruskan pembangunan di Sulawesi dimana Nahdlatul Wathan Anjani memiliki kader atau umat yang berada di Sulawesi. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa memiliki ikatan emosional dan nilai sejarah di dalam hubungan Nahdlatul Wathan dengan Nahdlatul Ulama karena Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Sehingga kader Nahdlatul Wathan Anjani dengan mudah menyatukan visi dan misi dengan Partai Kebangkitan

---

<sup>59</sup>H. Masudi Rahman, M.Pd.I memegang jabatan sebagai Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur. Wawancara tanggal 30 Maret 2015.

Bangsa karena ajaran Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Ulama tidak jauh berbeda.<sup>60</sup>

Dari beberapa pemaparan tersebut bisa dilihat bahwa teori pilihan rasional sangat tercermin pada pilihan Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam memilih untuk berafiliasi dengan partai politik apa pada setiap pemilu. Partai politik yang dipilih oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani berdasarkan partai politik mana yang bisa mewujudkan tujuan Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani untuk masuk ke pemerintahan atau legislatif sehingga bisa mengembangkan pembangunan dan perjuangan dalam bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang dakwah. Dari pemaparan tersebut juga menunjukkan bagaimana Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani memutuskan untuk mengubah haluan afiliasinya pada setiap pemilu karena untuk menghindari kerugian dalam hal ini kader-kader Nahdlatul Wathan tidak bisa masuk ke pemerintahan atau legislatif.

#### **D. Dinamika Mitra Politik Nahdlatul Wathan Perspektif Politik Islam**

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut ijihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ijihad itu dapat dikatakan upaya berpikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat. Antara upaya ijihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijihad, baik langsung atau tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain kemajuan ilmu dan teknologi, sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Dalam perspektif pemikiran hukum Islam para ulama menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijihad hukum. Metode-metode itu antara lain *qiyas*, *istislah*, *istishab* dan *'urf*. Penerapan metode-metode tersebut dalam prakteknya juga didasarkan atas *mabadi' syari'ah* dan *maqashid al-syari'ah*.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Drs. H. Azharlillail, M.Pd.I memegang jabatan sebagai Kabiro IAIH NW Lombok Timur dan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur NTB. Wawancara tanggal 28 Maret 2015.

<sup>61</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, hlm. 1.

Nahdlatul Wathan dalam membuat kebijakan sesuai dengan teori *mabadi' syari'ah* agar dalam berafiliasi tetap menjunjung tinggi nilai syari'at Islam, yaitu menggunakan asas keadilan, persamaan, toleransi, solidaritas dan kemerdekaan. hal tersebut tercermin dari kebijakan afiliasi yang dilakukan oleh Nahdlatul Wathan dimana kebijakan tersebut menjunjung tinggi hak-hak masyarakat maupun kader-kader Nahdlatul Wathan. Dalam berafiliasi, Nahdlatul Wathan saat ini sudah memberikan kesejahteraan demi kemaslahatan masyarakat Nahdlatul Wathan.

*Maqashid syari'ah* merupakan tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturannya yang aspek utamanya adalah kemaslahatan umat manusia di dunia maupun akhirat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Untuk mencapai kemaslahatan sebagai aspek utama dari *maqashid syari'ah*, perlu mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama. Perlindungan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim.<sup>62</sup>
2. Perlindungan terhadap nyawa. Pemeliharaan ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.<sup>63</sup>
3. Perlindungan terhadap akal. Perlindungan akal sangat penting karena akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.<sup>64</sup>
4. Perlindungan terhadap keturunan. Perlindungan terhadap keturunan adalah dengan mensyaratkan pernikahan dan

---

<sup>62</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 1.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 91.

mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.<sup>65</sup>

5. Perlindungan terhadap harta benda. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Dalam pemanfaatan harta di dunia, islam mengatur agar antar manusia tidak terjadi kecurangan dan perebutan harta antara satu manusia dengan manusia lain.<sup>66</sup>

Dari pemaparan teori di atas, sesuai dengan Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam berafiliasi dengan partai politik yang mempunyai tujuan utama yaitu kemaslahatan umat muslim khususnya umat Nahdlatul Wathan. Berafiliasi dengan partai politik merupakan salah satu cara untuk bisa mencapai posisi di eksekutif maupun legislatif. Dengan duduknya kader-kader Nahdlatul Wathan di eksekutif dan legislatif akan mempermudah dan memperlancar penyebaran dan pembangunan ajaran Nahdlatul Wathan di seluruh Indonesia melalui bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang dakwah. Dengan berdirinya lembaga pendidikan, lembaga sosial dan lembaga dakwah yang dibangun oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani di seluruh Indonesia akan menuntun kembali masyarakat yang awalnya aqidah dan akhlaknya tidak sesuai menjadi sesuai dengan aqidah dan akhlak yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat Indonesia dalam menjalani hidup juga mengalami perubahan terutama menyangkut tentang agama. Dari hal tersebut Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani memiliki keinginan untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran Nahdlatul Wathan ke seluruh pelosok Indonesia untuk tercapainya kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Hal tersebut memiliki relevansi makna dengan kaidah *ushuliyah*, sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 131.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 167.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>67</sup>

Sesuai dengan *maqashid syari'ah*, untuk mencapai kemaslahatan Nahdlatul Wathan melindungi lima unsur pokok. Pertama, dengan lembaga pendidikan dan kegiatan dakwah yang dibangun dan dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, Nahdlatul Wathan menyebarkan dan menegakkan ajaran agama Islam dengan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Dengan berdakwah, Nahdlatul Wathan menegakkan dan melindungi agama masyarakat Indonesia khususnya umat Nahdlatul Wathan untuk menjadi pedoman hidup mereka sebagai seorang Muslim. Hal tersebut sesuai dengan teori *maqashid syari'ah* bahwa pemimpin wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah. Allah SWT juga memerintahkan berusaha untuk menegakkan agama, firman-Nya dalam surat Asy-Syura' Ayat 13:

شرح لكم من الدين ماوصى به نوحاوالدى اوحيناإليك وماوصينا به ابراهيم وموس وعيس أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ماتدعوهم إليه منيشاءويهدى إليه من ينيب<sup>68</sup>

Kedua, dengan adanya dakwah yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Wathan, masyarakat juga diajarkan untuk menjaga nyawa dan jiwa guna menjalani hidup di dunia dengan banyak mengumpulkan pahala untuk keberlangsungan hidup di akhirat nanti. Selain itu dengan adanya kader-kader Nahdlatul Wathan yang duduk di kursi pemerintahan eksekutif maupun legislatif, dapat menjaga pergerakan dan penyebaran organisasi Nahdlatul Wathan di seluruh Indonesia dari kaum-kaum ekstrim yang bisa mengancam nyawa umat Islam khususnya umat Nahdlatul Wathan. Dalam *maqashid syari'ah* mengisyaratkan dalam unsur pokoknya seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan masyarakatnya. Bercermin pada zaman Orde Baru saat Nahdlatul Wathan melakukan politik diam, dimana politik diam adalah sebuah situasi saat kader-kader Nahdlatul Wathan dibebaskan untuk memilih partai politik yang diharapkan olehnya setelah ketua pimpinan Nahdlatul Wathan menyatakan keluar dari koalisi Golkar. Pada saat itu terjadi sebuah insiden kekerasan (kekerasan fisik maupun mental) terhadap kader-kader Nahdlatul Wathan yang ikut keluar dari Partai Golkar yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Soeharto. Setelah terjadinya insiden itu, ketua pimpinan Nahdlatul Wathan

<sup>67</sup>Mohammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, (Ciputat: PT. Logos Wacana, 2004), hlm. 241.

<sup>68</sup> QS Asy-Syura' (42): 13.

memutuskan untuk kembali berafiliasi lagi dengan Partai Golkar untuk menjaga keselamatan kader-kader Nahdlatul Wathan.<sup>69</sup>

Sesuai dengan kejadian di atas, terbukti Nahdlatul Wathan menjaga atau melindungi keselamatan jiwa dan nyawa kader Nahdlatul Wathan dari ancaman yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pokok unsur yang berada di *maqashid syari'ah*, bahwa seorang pemimpin harus menjaga jiwa dan nyawa masyarakat yang di pimpinnya. Dan seorang pemimpin itu harus memikirkan kemaslahatan masyarakat tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri karena menjaga kemaslahatan untuk masyarakat itu harus diutamakan. Untuk mencapai kesejahteraan dan ketentaraman sebuah daerah itu tergantung pada kehidupan masyarakat selama masyarakat itu tidak mendapat kesejahteraan, maka pemimpin itu disebut tidak mampu menjalankan tugasnya. Dengan demikian yang dilakukan pimpinan Nahdlatul Wathan itu menunjukkan jiwa seorang pemimpin melawan rasa malu ketika memutuskan keluar dari koalisi Partai Golkar tapi bergabung lagi demi kemaslahatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya.

Ketiga, duduknya kader-kader Nahdlatul Wathan baik di legeslatif maupun eksekutif juga untuk memperlancar pembangunan lembaga pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Tujuan membangun lembaga pendidikan ini untuk mencerdaskan masyarakat yang ada di sekitarnya, dan pendidikannya tidak hanya mempelajari pelajaran umum akan tetapi pendidikannya itu kental dengan aura agama. Sesuai dengan tujuan Nahdlatul Wathan, ingin mengembangkan hukum syariaat Islam dan menanamkan hukum syari'at agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Wathan juga mampu memberikan apresiasi dalam mencerdaskan akal seseorang melalui pendidikan yang dibangun agar orang tidak buta pada kewajiban yang ditentukan oleh syari'at Islam.

Terbukti saat ini banyak orang yang berbondong-bondong baik dari Lombok sendiri maupun luar Lombok menuntut ilmu di lembaga pendidikan Lombok Timur sebagai pusat pendidikan yang di dirikan oleh Nahdlatul Wathan. Sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang menyatakan bahwa seorang pemimpin mampu menjaga akal manusia dengan cara mencerdaskan untuk menempuh kewajiban Allah SWT sebagaimana

---

<sup>69</sup>Dr. Fauzan, MPd memegang jabatan sebagai Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan sebagai dosen perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Wathan. Wawancara tanggal 2 April 2015.

manusia wajib menuntut ilmu baik muslimin dan muslimat, dengan adanya pendidikan yang ada di Lombok Timur tidak perlu jauh-jauh untuk menuntut ilmu. Dan adanya pendidikan itu mampu memberikan pengetahuan pada manusia agar menjadi orang baik, karena dengan pengetahuan seseorang bisa membedakan barang halal dan haram.

Keempat, dalam *maqashid syariah* mengisyaratkan menjaga keturunan agar keturunan itu bisa memahami dan mengerti hal-hal apa saja yang dilarang oleh syari'at. Dengan demikian seorang wali harus memasukan anaknya ke lembaga pendidikan agar tahu mengenai ajaran syari'at untuk menjadi seorang anak yang diharapkan oleh agama, hal ini di tunjukkan oleh Nahdlatul Wathan dengan mendirikan lembaga pendidikan agar masyarakat yang mempunyai keturunan itu mampu belajar dan di tanamkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan syari'at. dan Nahdlatul Wathan juga memeberikan pengetahuan kepada masyarakat yang awam dalam hal pengetahuan Islam dengan cara berdakwah. Dakwah yang dilakukan oleh pemimpin dan kader-kader Nahdlatun Wathan ingin menunjukkan bahwa islam itu mengajarkan tentang kehidupan dan apa saja yang dilarangnya, dengan dakwah orang itu yang tidak tahu menjdi tahu karena pengetahuan itu yang akan diajarkan ke anak-anaknya agar menjadi anak yang baik setiap perbuatan dan perkataan itu mengikuti apa yang dilakukan orang tua atau orang yang didekatnya. Jadi yang berperan tidak hanya seorang guru yang ada di sekolah, melainkan yang berperan peting adalah orang tua. Karena orang tua lah yang bisa membentuk krakter anak itu sendiri.

Tetapi peran seorang guru juga tidak jauh penting dalam membentuk krakter anak didiknya. Guru juga mendidik anak didiknya bahwa perbuatan yang sangat bertentangan dengan syari'at cepatlah bertindak untuk mengurangi hal yang sangat fatal. Contohnya Seorang guru itu mengajarkan bagaimana batas aurat itu, karena saat ini aurat seorang wanita sudah tidak di perhatikan. Dengan hal ini orang tua juga memperhatikan pakaian dan tingkah-laku yang dilakukan oleh anaknya.

Kelima, seorang pemimpin tidak hanya membuat keputusan atau kebijakan. Tapi seorang pemimpin harus bisa menengahi setiap masalah yang terjadi pada masyarakatnya. Terbukti pada saat ini banyak kejadian masalah harta. dengan demikian Islam mengajarkan mengenai masalah harta tersebut, syari'at menyatakan bahwa harta yang dimiliki manusia itu merupakan titipan dari Allah SWT dan manusia harus mampu menjaganya dengan baik, jangan suka mengaku harta saudaranya sendiri karena itu merupakan perbuatan serakah. Serakah itu sangat dilarang oleh syari'at

Islam karena itu merupakan berpuatan setan. Ketika ada masalah tersebut maka yang berperan penting adalah seorang pemimpin yang bisa menengahi masalah itu, dalam penyelesaian masalah tersebut harus sesuai dengan ajaran yang sudah dijelaskan dalam syari'at Islam.

Dengan dakwah yang dilakukan Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Wathan mengajarkan hal sering terjadi agar masyarakat itu tahu hukum yang dilarangnya oleh syari'at dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Terutama masalah harta karena saat ini banyak yang timbul di masyarakat Lombok Timur adalah mengenai pengakuan tanah karena dulu tanah itu murah jadi tanah sekarang begitu diperhatikan karena sekarang tanah mahal jadi sekarang banyak masyarakat yang berbondong-bondong mempermasalahkannya. Dengan hal ini, Nahdlatul Wathan mampu menengahkan masyarakat tersebut, karena Nahdlatul Wathan merupakan organisasi yang disegani oleh masyarakat Lombok Timur. Jika Nahdlatul Wathan tidak bisa menengahinya maka yang ada saling melaporkan itu bisa membawa nama masyarakat Lombok Timur buruk karena masalahnya selalu tanah yang diperebutkan. Syari'at menjelaskan kalau Islam melarang mengakui barang yang sudah dimiliki saudaranya, Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

يأيهالين أمنولاتاكلوأمولكم بينكم بالبطل إلا أن تكون تجرة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً<sup>70</sup>

Pada sejarah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Rasul pernah melakukan koalisi atau pada masa itu disebut *at-Tabaluf* (kompromi). *At-Tabaluf* berasal dari kata *al-Hilfu* yang artinya perjanjian untuk saling menolong yang berasal dari kata *halafa yahlifu hilfan*. Dalam bentuk kalimat dikatakan *hilfuhu fulan sayakunu halifu* (Fulan berjanji dengan Fulan maka ia menjadi sahabatnya).<sup>71</sup>

Saat Nabi Muhammad SAW memasuki Madinah dan pembentukan negara baru, Nabi Muhammad SAW menghadapi masyarakat yang sangat heterogen atau beranekaragam dalam suku maupun agama. Seperti Muhajirin, suku Khazraj, suku Aus, Yahudi bani Quraizhah, Yahudi bani Qainuqa serta para pemimpin ekonomi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Melihat keadaan tersebut ketika akan dibentuk negara baru maka dibuatlah perjanjian yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah yang berisikan sebagai berikut: 1) Perjanjian persaudaraan diantara sesama

<sup>70</sup>An-Nisa' (4): 29.

<sup>71</sup> Munir Muhammad al-Gadban, *Al-Tahalluf*, hlm. 6.

muslim, 2) Perjanjian tolong-menolong kaum muslimin dengan kaum musyrikin, 3) Perjanjian kerjasama antara kaum muslimin dengan kelompok-kelompok besar Qabilah Arab non muslim, 4) Peraturan-peraturan yang berlaku umum.<sup>72</sup>

Piagam Madinah merupakan teks perjanjian Hak Asasi Manusia antar agama, suku dan golongan pertama di dunia yang tertulis dalam sejarah yang isinya kaitannya dengan golongan non muslim adalah sebagai berikut:

a. BAB II (dengan orang Yahudi)

1. Orang Yahudi bani Auf hidup berdampingan dengan kaum Mu'min. Bagi orang Yahudi diperbolehkan menganut agama mereka, dan bagi orang Mu'min diperbolehkan menganut agama mereka, begitu pula terhadap harta dan jiwa masing-masing.
2. Apabila ada salah satu dari mereka (Yahudi) melakukan kezaliman dan kesalahan, mereka tidak dapat dihukum semuanya, kecuali mereka yang melakukan perbuatan tersebut atau keluarganya.
3. Sesungguhnya orang yahudi dari bani Nadir mempunyai kesamaan dengan orang Yahudi bani Auf.
4. Sesungguhnya Yahudi dari bani Haritsah mempunyai kesamaan dengan orang Yahidi bani Auf.
5. Sesungguhnya orang Yahudi bani Saidah mempunyai kesamaan dengan orang Yahudi bani Auf.
6. Sesungguhnya orang Yahudi bani Jasyim mempunyai kesamaan dengan orang Yahudi bani Auf.
7. Sesungguhnya orang Yahudi bani Aus mempunyai kesamaan dengan orang Yahudi bani Auf.
8. Sesungguhnya orang Yahudi dari bani 'Tsa'labah mempunyai kesamaan dengan orang Yahudi bani Auf, kecuali bagi yang berbuat kezaliman dan kesalahan. Dan mereka semua tidak dihukum kecuali hanya yang berbuat kesalahan tersebut.
9. Sesungguhnya keselamatan jiwa orang bani 'Tsa'labah seperti orang-orang bani Auf.
10. Sesungguhnya orang-orang bani Syathbiyyah seperti orang-orang bani Auf.
11. Memberi pertolongan pada perbuatan baik dan bukan pada perbuatan buruk.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 83.

12. Bahwa orang-orang yang terkait perjanjian dengan bani Tsa'labah diperlakukan sama dengan kaum Mu'minin.
  13. Bahwa keselamatan jiwa orang-orang Yahudi sama dengan keselamatan jiwa kaum Mu'minin.
  14. Tidak dibolehkan seorangpun dari orang Yahudi keluar dari Madinah kecuali atas izin Rasulullah SAW.
  15. Tidak dibolehkan seorangpun pergi ke Makkah untuk balas dendam.
  16. Barang siapa yang melakukan pembunuhan maka hanya dirinya dan keluarganyalah yang mendapat hukuman dari perbuatannya, kecuali jika ia orang yang dizalimi.
  17. Allah melindungi isi perjanjian ini (Allah senantiasa memberikan keridhaan atas segala isi perjanjian).
  18. Orang Yahudi bekerjasama dengan kaum muslimin dalam mengumpulkan biaya perang selama terjadi peperangan.<sup>73</sup>
- b. BAB IV (peraturan-peraturan umum)
1. Tidaklah berdosa bagi orang-orang Mu'min yang melakukan perjanjian perdamaian dengan mereka.
  2. Hendaknya pertolongan ditunjukkan pada orang yang dizalimi.
  3. Orang-orang yang terkait dalam perjanjian ini dilarang untuk membunuh penduduk kota Yatsrib.
  4. Seorang tetangga bagaikan sebuah jiwa yang tidak pernah melakukan sesuatu yang membahayakan dan kesalahan terhadap dirinya sendiri.
  5. Tidak dibolehkan menikahi seorang wanita, kecuali atas izin keluarganya.
  6. Apabila terjadi suatu permasalahan atau perselisihan yang dikuatirkan akan terjadi perpecahan antara orang-orang yang memegang perjanjian hendaknya hal tersebut dikembalikan pada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
  7. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang yang paling mematuhi dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya isi perjanjian.
  8. Tidak dibolehkan memberi perlindungan kepada orang-orang Quraisy dan para penolongnya.
  9. Mereka harus saling menolong atas segala musibah yang menimpa penduduk Yatsrib.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 86.

10. Apabila mereka diajak untuk berdamai dan melaksanakan segala usaha untuk menuju perdamaian, mereka harus berdamai dan mewujudkan perdamaian tersebut.
11. Jika mereka dianjurkan untuk melakukan yang seperti itu, maka orang-orang Mu'min juga memiliki beban yang sama.
12. Kecuali terhadap orang yang memerangi agama mereka.
13. Tiap manusia memiliki bagiannya masing-masing dari apa yang ia kerjakan.
14. Bagi orang-orang Yahudi bani Aus, baik kolega ataupun dari mereka, memiliki persamaan mengenai isi perjanjian, dengan orang-orang yang memegang perjanjian ini. Dalam hal yang baik, bukan terhadap perbuatan jelek. Dan tidak mendapat hukuman kecuali yang melakukannya.
15. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang paling patuh dan paling baik dalam menjalankan isi perjanjian ini.
16. Isi perjanjian ini tidak berlaku atas orang yang melakukan kezaliman dan kesalahan.
17. Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya akan selalu menolong orang-orang yang baik dan bertakwa.<sup>74</sup>

Dari piagam tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membangun negara baru dengan kerjasama dan perjanjian formal dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib pada tahun 622. Rasulullah melakukan perjanjian tersebut untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu Piagam Madinah menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi dan komunitas-komunitas pagan Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *ummah*. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah melakukan perjanjian untuk tercapainya kepentingan yang positif yaitu guna terbentuknya negara Madinah yang tidak ada perpecahan.

Pada masa dimana Negara Madinah telah terbentuk, Nabi Muhammad SAW melakukan koalisi politik dengan qabilah-qabilah Musyrikin di luar Madinah untuk melawan Quraisy, seperti dengan bani Mudallij dan bani Dhamrah di sepanjang laut Merah pada jalur yang menuju ke Syam. Ketika pemimpin musyrik bani Juhainah, Majdi bin

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 87.

Amru al-Juhanilah bertemu Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka ia disambut oleh Nabi Muhammad SAW sehingga ia berkata: “Sungguh aku tidak tahu bahwa Maimun itu seorang pemimpin yang baik dalam urusan ini.” Dan ditetapkanlah perdamaian antara keduanya dengan kesepakatan Nabi Muhammad SAW tidak memerangi bani Dhamrah dan bani Dhamrah tidak memerangi Nabi Muhammad SAW serta tidak memprovokasi kelompok lain untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW serta tidak memberikan bantuan kepada musuh Nabi Muhammad SAW.

Dari perjanjian yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan kaum Musyrikin tersebut menunjukkan Nabi Muhammad SAW melakukan perjanjian untuk kepentingan tertentu. Perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Musyrikin karena Negara Madinah dan kaum muslim yang masih lemah sehingga membutuhkan bantuan oleh kaum-kaum lain untuk mengalahkan Quraisy dalam perang. Pasca koalisi-koalisi politik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tersebut (terutama pasca perang Badar dan perjanjian Hudhaibiyah) maka Nabi Muhammad SAW seringkali dikhianati dan disabot isi perjanjiannya terutama oleh kaum Yahudi, tapi Nabi Muhammad SAW berusaha mengatasi semua bahaya dan bertahan agar tidak menghadapi dua musuh sekaligus (Quraisy dan Yahudi), kecuali setelah kaum muslimin bisa mengalahkan musuh terbesarnya kafir Quraisy yaitu pasca perang Ahzab.<sup>75</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan koalisi-koalisi tersebut pada saat kaum Muslim masih lemah sehingga tidak mampu untuk mewujudkan tujuan mereka yaitu mengalahkan kaum Quraisy dan menegakkan Islam.

Dari sejarah Nabi Muhammad SAW dalam berkoalisi tersebut sesuai dengan yang diterapkan oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani. Dalam terjun di dunia politik dan dalam berafiliasi dengan partai politik, baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani tetap didasarkan pada aqidah atau asas yang diterapkan oleh TGKH.Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan pada masa kepemimpinannya. Pada masa kepemimpinan TGKH. Zainuddin, tujuan dari Organisasi Nahdlatul Wathan adalah *li 'lai kalimatillah wa 'izzul Islam wal muslimin* dan keselamatan serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, Nahdlatul Wathan telah

---

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 89.

menetapkan ruang lingkup usaha Nahdlatul Wathan seperti termuat dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Wathan, berikut ini:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui pondok pesantren, diniyah, madrasah/sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, kursus-kursus, serta meningkatkan dan menyempurnakan pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan;
2. Menyelenggarakan kegiatan sosial seperti menyelenggarakan panti asuhan, asuhan keluarga, rubath/pondok/asrama pelajar/mahasiswa, Pos Kesehatan Pondok Pesantren (POSKESTREN), Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Klinik Keluarga Sejahtera, dan Rumah Sakit;
3. Menyelenggarakan dakwah Islamiyah melalui pengajian (majelis dakwah/majelis taklim) tabligh, penerbitan, mengembangkan pusat informasi pondok pesantren, dan media lainnya;
4. Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak merugikan Nahdlatul Wathan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.<sup>76</sup>

Dari ruang lingkup usaha yang terkandung dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Wathan di atas menunjukkan bahwa tujuan utama dari Nahdlatul Wathan adalah menegakkan kembali ajaran-ajaran Islam yang saat ini sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin modern. Dalam menyebarkan ajaran-ajarannya, Nahdlatul Wathan menggunakan tiga bidang yaitu melalui bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan dan melalui dakwah Islamiyah. Sedangkan terjun di dunia politik dan berafiliasi dengan partai politik merupakan cerminan dari ruang lingkup usaha organisasi nomor 4 di atas. Sesuai dengan ruang lingkup usaha organisasi nomor 4, politik merupakan salah satu cara dakwah yang dilakukan Nahdlatul Wathan untuk mengembangkan pembangunan dan menyebar luaskan ajaran-ajaran yang diterapkan Nahdlatul Wathan yang tidak bertentangan dengan ajaran islam dan berafiliasi dengan partai politik adalah cara untuk bisa masuk ke pemerintahan atau legislatif. Dengan masuknya kader-kader Nahdlatul Wathan dalam pemerintahan atau legislatif maka akan mempermudah pembangunan dan penyebaran ajaran-ajaran Nahdlatul Wathan.

---

<sup>76</sup> M. Mugni Sn, *Ibu Rumah Tangga*, hlm. 16.

Baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani dalam berafiliasi dengan partai politik didasarkan pada pemikiran TGKH. Zainuddin pendiri Nahdlatul Wathan. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menjadikan al-Qur'an, al-Sunnah dan pengalaman para sahabat dan tabi'in sebagai referensi utama yang menjadi norma dasar dalam menyikapi realitas politik yang ada. Selain menggunakan al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' Sahabat dan Tabi'in, ia juga selalu merujuk kepada nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti semangat egalitarianisme, musyawarah, keadilan dan amanah. Nilai-nilai ini merupakan konsep generik dari al-Qur'an sebagai acuan dan dipraktekkan secara baik dan konsisten oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>77</sup>

Jadi baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani dalam berafiliasi dengan partai politik menggunakan dasar sejarah perilaku Nabi Muhammad SAW karena Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani sampai sekarang terus menggunakan pemikiran TGKH. Zainuddin yang menggunakan al-Qur'an, al-Sunnah, ijma' Sahabat dan Tabi'in sebagai acuan dalam melakukan tindakan organisasi. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani tidak menjadikan partai politik sebagai tujuan atau panutan, melainkan partai politik hanya dijadikan kendaraan atau alat untuk mencapai posisi-posisi di legislatif sehingga mereka dapat mewujudkan tujuan-tujuan mereka yaitu menegakkan ajaran-ajaran islam yang sudah tergerus oleh perkembangan zaman yang semakin modern. hal tersebut terbukti di mana kader-kader Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani yang telah sukses duduk di kursi pemerintahan eksekutif maupun legislatif tetapi tidak menjalankan ideologi dan tujuan dari organisasi, maka oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Anjani langsung di dikeluarkan dari kepengurusan organisasi dan tidak akan diterima kembali.<sup>78</sup>

## E. Penutup

1. Baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani menggunakan rasionalnya untuk memilih berafiliasi dengan partai politik apa pada setiap pemilu. Karena dalam menentukan

---

<sup>77</sup> Mohammad Noor, Muslihan Habib, Muhammad Harfin, *Visi Kebangsaan*, hlm. 243.

<sup>78</sup>Drs. H. Azharlillail, M.Pd.I memegang jabatan sebagai Kabiro IAIH NW Lombok Timur dan Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin Nahdlatul Wathan Anjani Lombok Timur NTB. Wawancara tanggal 28 Maret 2015.

pilihannya, Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani menimbang-nimbang partai politik mana yang lebih memberi manfaat dan membawa kerugian yang minim karena partai politik yang dipilih oleh Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani akan menentukan perkembangan Nahdlatul Wathan ke depan. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani menggunakan partai politik sebagai kendaraan untuk bisa masuk ke dalam sistem birokrasi baik melalui Eksekutif maupun Legislatif. Dengan masuknya kader-kader Nahdlatul Wathan ke dalam sistem pemerintahan maka akan mempermudah dalam menyampaikan aspirasi organisasi dan mengembangkan pembangunan dalam bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang dakwah Islamiyah. Sehingga perlu menggunakan kendaraan politik bisa membawa kader-kader Nahdlatul Wathan masuk ke dalam pemerintahan. Hal tersebut senada dengan teori pilihan rasional dimana individu atau sekelompok individu bertindak atau memilih dengan menimbang manfaat dan kerugian yang didapat dari tindakan atau pilihan tersebut. Sama halnya dengan Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani memilih partai politik sebagai kendaraan politik dengan menimbang keuntungan dan kerugian yang didapat dari partai politik tersebut.

2. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam penyebaran ajarannya sebagai tujuan dari berafiliasi dengan partai politik dan jabatan di pemerintahan eksekutif dan legislatif, tetap menjunjung tinggi nilai syari'at Islam yaitu menggunakan asas keadilan, persamaan, toleransi, solidaritas dan kemerdekaan sesuai dengan konsep *mabadi' syari'ah*. Nahdlatul Wathan juga mewujudkan lima unsur pokok yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Hal tersebut sesuai dengan teori *maqashid syari'ah* di mana untuk tercapainya kemaslahatan umat, maka harus tercapai lima unsur pokok tersebut. Nahdlatul Wathan sebagai organisasi masyarakat keagamaan Islam yang bertujuan *Li i'lai kalimatillah wa 'izzul Islam wal muslimin* dan keselamatan serta kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dalam mewujudkan tujuan tersebut juga berdasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah dan pengalaman para sahabat dan tabi'in. Sesuai dengan yang disebutkan pada Anggaran Dasar Nahdlatul Wathan bahwa Nahdlatul Wathan menyelenggarakan usaha-usaha yang tidak

bertentangan dengan ajaran Islam. Termasuk dalam kegiatan berpolitik, baik Nahdlatul Wathan Pancor maupun Nahdlatul Wathan Anjani tetap berlandaskan pada pemikiran TGKH. Zainuddin selaku pendiri Nahdlatul Wathan tersebut. Dalam berafiliasi dengan partai politik tujuan utama Nahdlatul Wathan bukan semata-mata untuk jabatan atau kekuasaan, melainkan mendapatkan jabatan dan kekuasaan tersebut bertujuan untuk menegakkan ajaran-ajaran islam. Hal tersebut sesuai dengan koalisi politik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan kaum Musyrik pada saat pembentukan Negara Madinah atau setelah Negara Madinah berdiri. Koalisi politik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan tujuan untuk menegakkan ajaran-ajaran islam karena pada saat itu kaum Muslimin masih lemah dan tidak mampu melawan kaum Quraisy.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Aqiel Siradj, Said, *Islam Kebangsaan (Fiqh Demokratik Kaum Santri)*, Jakarta: Pustaka Ciganjur Fatma Press, 1999.
- Aziz, Amir Ahmad, *Pola Dakwah TGH. Mubammad Zainuddin Abdul Madjid (1989-1997)*, Mataram: Larispa, 2011.
- Baharuddin, *Nahdlatul Wathan & Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Bahri, Sudirman, Ratmaja Lalu, *Sejarah Perkembangan Agama Islam di Lombok*, Lombok Timur: KSU "Primaguna", 2012.
- Bakri, Jaya Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bungin, H. Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Habib, Muslihan, *Pendidikan Ke-NW-an Untuk Kelas X*, Jakarta: Bania Publishing, 2014.
- Habib, Muslihan, *Pendidikan Ke-NW-an Untuk Kelas XI*, Jakarta: Bania Publishing, 2013.

- Hamdi, Saipul, *Nahdlatul Wathan Di Era Reformasi: Agama, Konflik dan Peta Rekonsiliasi*, Yogyakarta: KKS Yogyakarta, 2014.
- Hayyi, Nu'man Abdul, *Riwayat Hidup dan Perjuangan TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid*, Pancor: PBNW, 1999.
- Hayyi, Nu'man Abdul, Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan: Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiyah*, Lombok Timur: Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Lombok Timur, 1988.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Marsh, David, Garry Stoker, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Noor, Mohammad, Muslihan Habib, Muhammad Harfin, *Visi Kebangsaan Religius: Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuan guru Kyai Haji Mubammad Zainuddin Abdul Madjid 1904-1997*, Ciputat: PT. Logos Wacana, 2004.
- Quthb Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Sahidu Muzaffar, *Keadilan & Persamaan Dalam Masyarakat Muslim*, Islam House, 2009.
- Sitepu, P. Anthonius, *Teori-Teori Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sn, Mugni M, *Ibu Rumah Tangga Getarkan Lombok: Biografi Ummuna Sitti Raibanun Zainuddin Abdul Madjid*, Banten: CV Dunia Kata, 2013.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1992.
- Tim Redaksi Kabid Pendidikan Nahdlatul Wathan, *Ke-NW-an Untuk Kalangan Sendiri*, Pancor: Biro Dakwah yayasan pendidikan HAMZANWADI, 2001.
- Zulkarnain, *Tuan Guru Bajang: Berpolitik dengan Dakwah dan Berdakwah dengan Politi*, Kediri: Kaysamedia, 2009.